

 GRAHA ILMU



Dasar-dasar **PRODUKSI PERKEBUNAN**



Dr. Ir. Rusdi Evizal, M.S.

Dasar-dasar
PRODUKSI
PERKEBUNAN

Dasar-dasar **PRODUKSI PERKEBUNAN**

Dr. Ir. Rusdi Evizal, M.S.

Dasar-dasar Produksi Perkebunan, oleh *Dr. Ir. Rusdi Evizal, M.S.*

Hak Cipta © 2014 pada penulis



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-4462135; 0274-882262; Fax: 0274-4462136 E-mail: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN:

Cetakan ke I, tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT bahwa penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ajar ini yang merupakan pengembangan dari bahan-bahan pada perkuliahan agronomi perkebunan. Mata kuliah Produksi Tanaman Perkebunan diberikan sebagai matakuliah wajib di Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Lampung baik Program D3 Perkebunan maupun Program S1. Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar bagi mahasiswa untuk memahami teknis sekaligus perspektif dalam produksi perkebunan yang dapat bermanfaat di dunia pekerjaan yang terkait dengan bidang perkebunan, sejak dari perencanaan sampai panen. Buku ini merangkup penerapan berbagai ilmu terkait dengan produksi perkebunan namun berusaha memberikan penekanan pada agronomi yang khas dilakukan di perkebunan serta isu pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Buku yang khusus membahas agronomi produksi perkebunan hanya sedikit ditemukan. Buku yang mudah ditemukan adalah buku yang membahas produksi satu komoditas perkebunan. Upaya untuk mengambil pola yang umum berlaku untuk semua komoditas perkebunan merupakan kesulitan tersendiri, karena morfologi tanaman perkebunan serta bentuk hasil panen beragam yang dulu dikenal dengan istilah perkebunan aneka tanaman. Bagaimanapun penulis berusaha merangkum tindakan agronomi yang paling umum dilakukan dalam produksi perkebunan.

Pengembangan tulisan ini sudah dimulai sejak tahun 1992 sebagai bahan untuk mata kuliah yang disebut dengan Teknik Perkebunan. Penambahan bab dan subbab yang terkait dengan tahapan produksi perkebunan telah dilakukan. Mengingat keterbatasan penulis, masih banyak kelemahan yang ditemukan dalam buku ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk perbaikan buku ini di edisi revisi berikutnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen Ir. Indarto, M.S. (almarhum), Dr. Maria Viva Rini, Dr. F. Erry Prasmatiwi, dan Ir. Sugiatno, M.S. atas masukan dan diskusi yang dilakukan selama ini.

Bandar Lampung, Oktober 2013

Rusdi Evizal

KATA SAMBUTAN

Pengembangan subsektor perkebunan perlu didukung berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dalam kapasitasnya menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dibidang pekebunan baik sebagai peneliti, praktisi, maupun pengambil keputusan. Untuk itu staf dosen didorong untuk menulis berbagai buku ajar di bidang perkebunan. Agroteknologi perkebunan berkembang dengan pesat terutama di perkebunan besar, namun teknologi di perkebunan rakyat juga berkembang misalnya terkait dengan kearifan lokal, keragaman hayati, dan isu global perkebunan berkelanjutan.

Buku teks di bidang produksi perkebunan masih terbatas. Universitas Lampung menyambut baik penerbitan buku “Dasar-dasar Produksi Perkebunan” ini yang sejak tahun 1992 telah digunakan sebagai bahan kuliah di jurusan Budidaya Pertanian/Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Buku dirasa perlu disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi lainnya dan masyarakat pada umumnya.

Semoga buku ini membawa manfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi penulis sebagai dedikasi yang bernilai ibadah.

Bandar Lampung, Januari 2013
Pembantu Rektor I
Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENGERTIAN DAN AZAS PERKEBUNAN	1
1.1 Pengertian Perkebunan	1
1.2 Azas dan Misi Perkebunan	3
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Perkebunan	3
1.4 Pola Pengembangan Perkebunan	4
1.5 Perkebunan Sebagai Penghasil Bahan Baku	5
1.6 Pendorong Pembangunan Wilayah	6
1.7 Pendorong Agrowisata	6
1.8 Eksplotasi Sumber Daya Alam	7
1.9 Sistem Produksi Perkebunan	8
DAFTAR PUSTAKA	13
BAB II SEJARAH PERKEBUNAN	15
2.1 Perkebunan pada Zaman VOC	15
2.2 Perkebunan pada Zaman Hindia Belanda	16
2.3 Masyarakat Perkebunan Kolonial	17
2.4 Perkembangan Perkebunan pada Masa Awal Kemerdekaan	18
2.5 Perkebunan Negara Masa Orde Baru dan Reformasi	19
2.6 Perkebunan Negara pada Masa Depan	22
2.7 Sejarah Lembaga Penelitian Perkebunan	22
2.8 Asosiasi Penelitian Perkebunan	24
2.9 Lembaga Penelitian Perkebunan Lingkup Litbang Pertanian	25
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB III	KESESUAIAN LAHAN DAN PEWILAYAHAN KOMODITAS	29
	3.1 Syarat Tumbuh	29
	3.2 Karakteristik Lahan	31
	3.3 Kesesuaian Lahan	34
	3.4 Pewilayahan Komoditas	42
	DAFTAR PUSTAKA	47
BAB IV	PENYIAPAN LAHAN	49
	4.1 Pengumpulan Data Dasar	49
	4.2 Pembukaan Lahan	50
	4.3 Pengolahan Tanah	54
	4.4 Bangunan Konservasi	57
	DAFTAR PUSTAKA	60
BAB V	PEMBIBITAN	61
	5.1 Pemilihan Bibit Unggul dan Bermutu	61
	5.2 Kebun Induk	62
	5.2 Pembibitan Awal (Prenursery)	64
	5.3 Pembibitan Utama (Main-nursery)	65
	5.4 Pengangkutan Bibit	66
	5.5 Perencanaan Pembibitan	67
	DAFTAR PUSTAKA	70
BAB VI	PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN KEBUN	71
	6.1 Mengatur Jarak Tanam	71
	6.2 Mengajir	74
	6.3 Membuat Lubang Tanam	75
	6.4 Transplanting	76
	6.5 Penyulaman	78
	6.6 Pemeliharaan Kebun	78
	6.7 Tahapan Pertumbuhan	79
	DAFTAR PUSTAKA	82
BAB VII	KACANGAN PENUTUP TANAH (LCC)	83
	7.1 Manfaat LCC	83
	7.2 Sifat LCC Penting	87
	7.3 Kelemahan LCC	90
	7.4 Produksi Benih LCC	90
	7.5 Perbanyak dengan Stek	91
	7.6 Penanaman LCC	91
	7.7 Pengaruh LCC terhadap Pertumbuhan dan Produksi	92
	DAFTAR PUSTAKA	94
BAB VIII	POHON PELINDUNG	95
	8.1 Fungsi Pohon Pelindung	95
	8.2 Kerontokan Daun Pelindung	99
	8.3 Jenis Pohon Pelindung	101
	8.4 Pisang Sebagai Penaung Sementara	105
	8.5 Penanaman Pohon Pelindung	106
	8.6 Pemangkasan Pohon Pelindung	106
	8.7 Pengaruh Pohon Pelindung Terhadap Produksi	107
	DAFTAR PUSTAKA	108

BAB IX	PERTANAMAN CAMPURAN DI PERKEBUNAN	111
	9.1 Tanaman Awal	112
	9.2 Tanaman Sela di Kebun TBM	113
	9.3. Tanaman Sela di Kebun TM	117
	DAFTAR PUSTAKA	120
BAB X	PENGENDALIAN GULMA DI PERKEBUNAN	123
	10.1 Status Gulma	124
	10.2 Penilaian Gulma	124
	10.3 Analisis Vegetasi Gulma	125
	10.4 Gulma Penting di Perkebunan	128
	10.5 Pengaruh Gulma pada Beberapa Tanaman Perkebunan	130
	10.6 Pemilihan Metode Pengendalian Gulma di Perkebunan	131
	10.7 Teknik Pengendalian Gulma di Perkebunan	132
	DAFTAR PUSTAKA	134
BAB XI	REPLANTING DAN KONVERSI	135
	11.1 Alasan Peremajaan	136
	11.2 Umur Peremajaan	137
	12.3 Teknis Peremajaan	138
	11.3 Konversi	139
	11.4 Rehabilitasi	140
	11.5 Penyisipan	141
	DAFTAR PUSTAKA	142
BAB XII	PEMUPUKAN DI PERKEBUNAN	143
	12.1 Kebutuhan Hara Tanaman	143
	12.2 Penelitian Dosis Pemupukan	144
	12.3 Penetapan Dosis Pemupukan	147
	13.3 Waktu dan Frekuensi Pemupukan	151
	12.4 Tempat dan Cara Pemberian Pupuk	152
	DAFTAR PUSTAKA	152
BAB XIII	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT	155
	13.1 Pengendalian Hama Terpadu	156
	13.2 Pengendalian secara Kultur Teknis	156
	13.3 Sistem Peringatan Dini	158
	13.4 Pemanfaatan Musuh Alami	159
	13.5 Aplikasi Pestisida	163
	DAFTAR PUSTAKA	164
BAB XIV	PEMANGKASAN	165
	14.1 Prinsip Pemangkasan	165
	14.2 Dominansi dan Kontrol Apikal	166
	14.3 Produktivitas Daun	166
	14.4 Tujuan Pemangkasan	168
	14.5 Jenis Pemangkasan	168
	14.6 Waktu Pemangkasan	169
	14.7 Alat dan Cara Pemangkasan	169
	DAFTAR PUSTAKA	172

BAB XV	KEBUN WANATANI	173
	15.1 Jenis Kebun Wanatani	174
	15.2 Pola Kebun Hutan	175
	15.3 Kebun Tradisional (Repong)	177
	15.4 Kebun Berpohon Penaung atau Berpohon Pagar	181
	15.5 Kebun Berpagar Pohon Jati (Agroforestri Jati)	182
	15.6 Hutan Kemasyarakatan	184
	DAFTAR PUSTAKA	185
BAB XVI	PANEN DAN PASCAPANEN PERKEBUNAN	187
	16.1 Jadwal Panen	188
	16.2 Hanca dan Regu Panen	189
	16.3 Survei Panen	191
	16.4 Pengangkutan	192
	16.5 Pengawasan Panen	192
	16.6 Premi panen	193
	16.7 Pasca Panen	193
	16.8 Rendemen	194
	16.9 Target Produksi	196
	16.10 Analisis Kinerja Perkebunan	196
	DAFTAR PUSTAKA	197
GLOSARI		199
INDEKS		203
TENTANG PENULIS		211

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan	10
Tabel 2.	Asal dan dasar hukum pembentukan PTP	20
Tabel 3.	Asal peleburan dan dasar hukum pembentukan PTPN	21
Tabel 4.	Sejarah Puslitbang Perkebunan	25
Tabel 5.	Contoh perhitungan defisit air pada tanaman kelapa sawit	31
Tabel 6.	Klasifikasi bentuk relief dan kelerengan	32
Tabel 7.	Kelerengan lahan dan sistem pertanaman	32
Tabel 8.	Kesesuaian lahan tanaman vanili	34
Tabel 9.	Deskripsi klasifikasi lahan menurut FAO	35
Tabel 10.	Skala kesesuaian lahan untuk kelapa sawit	38
Tabel 11.	Hubungan kesesuaian lahan dan produktivitas kelapa sawit	38
Tabel 12.	Kesesuaian lahan kakao menurut PPPKI	39
Tabel 13.	Kesesuaian lahan kakao menurut BBSDLP	39
Tabel 14.	Evaluasi kesesuaian lahan kakao	40
Tabel 15.	Luas areal (pi) perkebunan rakyat di Propinsi Lampung tahun 2009	46
Tabel 16.	Nilai LQ komoditas subsektor perkebunan di Propinsi Lampung	46
Tabel 17.	Bahan siap kirim dan bahan siap tanam	62
Tabel 18.	Intensitas naungan pada pembibitan kopi	66
Tabel 19.	Intensitas sinar pada pembibitan teh	66
Tabel 20.	Jadwal pembibitan karet	67
Tabel 21.	Kebutuhan tenaga dan alat pada pembibitan karet untuk luas kebun 1 ha kebun bibit batang bawah	68
Tabel 22.	Jarak tanam dan populasi tanaman perkebunan	73
Tabel 23.	Umur bibit siap tanam	76
Tabel 24.	Kalender penanaman kebun campuran lada - kopi	77
Tabel 25.	Skala perkecambahan benih aren	80
Tabel 26.	Tahap pertumbuhan utama tanaman menurut skala BBCH	80
Tabel 27.	Pengaruh LCC terhadap sifat fisik tanah dan pertumbuhan karet	84
Tabel 28.	Sumbangan hara beberapa LCC	86
Tabel 29.	Pengaruh LCC terhadap hara tererosi	87

Tabel 30. Pengaruh LCC terhadap lilit batang karet pada umur 4 tahun	93
Tabel 31. Pengaruh LCC terhadap matang sadap karet	93
Tabel 32. Pengaruh penutup tanah terhadap produksi tanaman karet	93
Tabel 33. Pengaruh naungan terhadap laju fotosintesis daun kopi	96
Tabel 34. Pengaruh naungan terhadap kandungan klorofil daun lada	96
Tabel 35. Tingkat naungan optimum beberapa tanaman perkebunan	97
Tabel 36. Bobot tajuk dan sumbangan N beberapa pohon pelindung	98
Tabel 37. Pengaruh tingkat naungan pohon pelindung terhadap penekanan gulma	99
Tabel 38. Interaksi pemupukan dan pohon pelindung	108
Tabel 39. Pengaruh jenis pelindung terhadap produktivitas lada	108
Tabel 40. Pendapatan bersih tanam sela di kebun sawit TM	114
Tabel 41. Hasil panen tanaman sela di kebun karet TBM	115
Tabel 42. Produksi tanaman kentang di sela kebun TBM kopi	116
Tabel 43. Pengaruh berbagai tanaman sela terhadap pertumbuhan tanaman karet	116
Tabel 44. Produksi kakao dengan pelindung kelapa dan lamtoro	119
Tabel 45. Produksi kelapa pada berbagai tanaman sela/campuran	119
Tabel 46. Produksi kelapa pada berbagai pola campuran	120
Tabel 47. Perhitungan analisis vegetasi	125
Tabel 48. Matriks koefisien kesamaan komunitas	127
Tabel 49. Penghitungan indeks keragaman gulma	128
Tabel 50. Cabang primer teh yang pada 9 bulan setelah perlakuan gulma dan produksi pucuk teh	130
Tabel 51. Pengaruh gulma terhadap pertumbuhan bibit lada	131
Tabel 52. Pengaruh pengendalian gulma terhadap produksi kelapa sawit	131
Tabel 53. Norma pengendalian gulma perkebunan	133
Tabel 54. Komposisi areal kebun berdasarkan fase tanaman	137
Tabel 55. Umur produksi puncak komoditas perkebunan	137
Tabel 56. Produktivitas kakao dengan tanam ulang dan penyisipan	141
Tabel 57. Jumlah hara yang diserap tanaman kelapa sawit	144
Tabel 58. Dosis pemupukan tanaman kelapa sawit pada tanah aluvial dan hidromorfik di Sumatera Utara	145
Tabel 59. Batas kritis kandungan unsur hara daun teh	147
Tabel 60. Rekomendasi umum pemupukan tanaman kakao	147
Tabel 61. Dosis pemupukan kakao berdasarkan produktivitas	148
Tabel 62. Rekomendasi umum dosis pemupukan kelapa sawit TM	148
Tabel 63. Penentuan dosis pemupukan tanaman tebu	149
Tabel 64. Kriteria status hara daun tanaman karet	150
Tabel 65. Klasifikasi dan skor kadar hara tanah	150
Tabel 66. Rekomendasi pupuk kelapa hibrida	151
Tabel 67. Jenis-jenis kebun wanatani dan pola tanamannya	174
Tabel 68. Pola pemeliharaan kebun lada-kopi di Lampung	178
Tabel 69. Jenis vegetasi pada budidaya lada-kopi pola wanatani	179
Tabel 70. Fase pembentukan repong dari kebun lada agroforestri di Lampung Utara	180
Tabel 71. Tipe panen tanaman perkebunan	188
Tabel 72. Musim panen kakao di PNG	189
Tabel 73. Rendemen beberapa komoditas perkebunan	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Respon pertumbuhan dan produksi tanaman terhadap karakteristik lahan: (A) kuadratik, (B) logistik maksimum, dan (C) logistik minimum	33
Gambar 2.	Hubungan antara jumlah parameter evaluasi lahan dengan ketepatan pendugaan produksi	36
Gambar 3.	Pengaruh populasi terhadap produktivitas jangka panjang	72
Gambar 4.	Pengaruh jarak tanam terhadap produktivitas karet	72
Gambar 5.	Pengaruh populasi terhadap produksi teh (A) umur 2 tahun, (B) umur 5 tahun (Sumber: Willson, 1999)	73
Gambar 6.	Sistem jarak tanam: (1) bujur sangkar 2x2 (populasi 2500), (2) jajaran genjang 2x2,3 (populasi 2500), (3) empat persegi panjang 3 x 7 (populasi 476), (4) pagar ganda 2x2x4 (populasi 1667), (5) segitiga sama sisi 9x9x9 (populasi 143)	74
Gambar 7.	Tahap perkembangan tandan bunga, pembungaan, dan buah kopi	81
Gambar 8.	Produksi biomassa beberapa LCC	85
Gambar 9.	Profil kedalaman perakaran LCC	86
Gambar 10.	Hubungan penutup tanah dengan erosi pada tanah tanpa penutup (A), berumput alami (B), berkacangan konvensional (C), berpenutup Cc (D).	87
Gambar 11.	Kebun kopi berpohon pelindung	96
Gambar 12.	Pohon pelindung sebagai rambatan vanili	97
Gambar 13.	Bintil akar pohon pelindung gamal	98
Gambar 14.	Dinamika kerontokan daun pohon pelindung dan curah hujan	100
Gambar 15.	Dinamika penaungan oleh pohon pelindung	100
Gambar 16.	Lamtoro sebagai pelindung di kebun kopi	102
Gambar 17.	Pola penanaman pohon pelindung tetap dan sementara: (A) jarak tanam kakao (o) 3 x 3 m dan lamtoro (x) 6 x 6 m, dan pisang (v) 6 x 3 m, (B) jarak tanam kopi (o) 2 x 2 m dan dadap (x) 4 x 4 m	106
Gambar 18.	Pengaruh naungan terhadap produktivitas kopi	107
Gambar 19.	Pola tanam pada kebun campuran	112
Gambar 20.	Penaungan (A) dan transmisi sinar matahari (B) di kebun kelapa	118
Gambar 21.	Trend produktivitas kebun karet	137
Gambar 22.	Puncak produktivitas kopi muda dan kopi rehabilitasi	140
Gambar 23.	Diagram defisiensi dan toksisitas sehubungan dengan kandungan hara daun dan pertumbuhan serta hasil	146

Gambar 24. Hubungan antara indeks luas daun dengan pertumbuhan	167
Gambar 25. Letak bidang pangkas untuk menghilangkan cabang	170
Gambar 26. Letak pemangkasan (1) dekat batang utama, (2) dekat mata tunas	170
Gambar 27. Urutan pemotongan cabang: 1= Pemotongan pertama, 2= pemotongan kedua, 3=pemotongan akhir, 4= leher cabang	171
Gambar 28. Hasil pemangkasan spektral: 1=pemangkasan tahun I, 2=pemangkasan tahun II, 3=pemangkasan tahun III, 4=pemangkasan tahun IV	171

B A B I

PENGERTIAN DAN AZAS PERKEBUNAN

1.1 Pengertian Perkebunan

Menurut Undang-Undang tentang Perkebunan yaitu UU No 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan perkebunan (*plantation*), yang sering disingkat sebagai “perkebunan” merupakan usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen. Dengan pengertian ini maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global. Maka dikenal adanya perkebunan tebu, perkebunan sawit, perkebunan nanas, perkebunan singkong, perkebunan pisang dan sebagainya.

Khususnya di Indonesia, istilah komoditas perkebunan umumnya merujuk kepada sekelompok tanaman atau komoditas tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 511/Kpts/PD 310/9/2006 tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura, lingkup komoditas perkebunan meliputi 124 jenis tanaman ditambah 2 kelompok tanaman penunjang perkebunan yaitu kelompok tanaman penutup tanah serta kelompok tanaman pupuk hijau (Tabel 1). Sedangkan komoditas yang di bawah binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi kelompok tanaman padi dan palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sementara komoditas di bawah binaan Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi kelompok komoditas buah-buahan, sayuran, fitofarmaka, dan tanaman hias. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komoditas perkebunan meliputi komoditas selain tanaman pangan dan hortikultura. Dengan demikian jenis komoditas perkebunan demikian luas yang kemungkinan akan terus bertambah dengan ditemukannya manfaat tumbuhan tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri tertentu. Dari 124 komoditas perkebunan tersebut, komoditas perkebunan yang utama adalah sawit, kelapa, karet, tebu, tembakau, kina, teh, kopi, dan kakao. Ada juga komoditas perkebunan yang menjadi unggulan suatu daerah seperti lada di Propinsi Lampung, kayu manis di Propinsi Sumatera Barat, cengkeh di Propinsi Sulawesi Utara, dan pala di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu istilah perkebunan menunjuk kepada bidang-bidang lahan pertanaman untuk memproduksi komoditas tanaman industri. Perkebunan terdiri dari banyak kebun-kebun yang berarti pertanaman dalam luasan yang besar. Pada perkebunan rakyat, kebun-kebun tersebut dimiliki petani dengan luasan yang relatif sempit umumnya 1-2 ha. Pada perkebunan besar, satu unit kebun, atau satu unit blok kebun (*afdeling*) dapat mencakup luasan puluhan atau ratusan ha. Menurut pengertian ini maka kebun juga tidak terbatas pada komoditas perkebunan, yaitu dapat berupa kebun kopi (komoditas perkebunan), kebun salak (komoditas hortikultura), maupun kebun singkong (komoditas pangan).

Istilah lain yang kadang disamakan dengan kebun adalah istilah ladang (menetap) yang juga sama-sama menunjuk kepada bidang lahan pertanaman. Akan tetapi istilah ladang lebih merujuk kepada sistem usahatani yang subsisten khususnya untuk tanaman semusim, sedangkan istilah kebun merujuk kepada sistem usahatani komersial. Perladangan berpindah (*shifting cultivation*) masih diterapkan terutama pada wilayah tertentu yang aksesibilitasnya terbatas. Umumnya sistem perladangan berpindah akan beralih kepada sistem tegal atau sistem kebun dengan semakin terbatasnya lahan dan meningkatnya pemasaran. Tanaman aren merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak ditemukan di sistem perladangan berpindah (Iskandar, 1992). Sesungguhnya aren di ladang tumbuh sendiri dan dipelihara karena memberikan banyak manfaat bagi peladang. Pada saat ladang bertransformasi menjadi kebun, aren yang tumbuh di kebun sebagian tetap dipelihara, misalnya di perkebunan kopi rakyat dan kebun buah.

Banyak tanaman perkebunan yang termasuk tanaman keras yaitu berupa tanaman tahunan dan berkayu. Istilah tanaman keras merujuk kepada tanaman yang berciri-ciri jika diusahakan lama untuk memberikan hasil, siklus hidupnya juga lama, bersifat mengawetkan tanah, tidak perlu dikelola secara intensif. Ciri-ciri tersebut juga terlihat pada cara budidayanya sejak dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Budidaya tanaman keras bersifat jangka panjang yang jika berhasil akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Istilah tanaman industri juga diberikan kepada tanaman perkebunan. Produk komoditas perkebunan umumnya dikonsumsi atau digunakan konsumen setelah melalui pengolahan di pabrik, baik berupa pengolahan yang sederhana sampai pengolahan rumit dan lintas pabrik berupa pohon industri yang panjang. Sebagai contoh, kelapa dan kelapa sawit merupakan bahan baku minyak goreng, margarin, sabun dan berbagai produk lainnya, tebu merupakan bahan baku gula, spiritus, alkohol, dan penyedap rasa; lateks merupakan bahan baku berbagai macam produk karet seperti ban dan karet busa; kapas merupakan bahan baku tekstil. Di perkebunan besar, unit pabrik dibangun untuk mengolah hasil dari unit-unit kebun. Kadang-kadang perusahaan juga membeli bahan baku pabrik dari perkebunan rakyat, terutama jika kapasitas pabrik masih belum terpenuhi atau karena perusahaan melakukan kemitraan dengan petani. Sebagai usaha agroindustri, perkebunan besar lebih merupakan usaha industri daripada usaha tani yang dicirikan oleh kompleksitas struktur organisasi, pengelolaan aset-aset, produksi, lingkungan, dan pemasaran. Sebaliknya perkebunan rakyat dikelola sebagai usaha tani dengan modal dan produksi yang terbatas.

Perkebunan merupakan penghasil komoditas perdagangan, terutama berorientasi kepada pasar ekspor. Termasuk juga perkebunan rakyat, juga berorientasi kepada pasar, bukan usaha tani yang bersifat subsisten. Petani bahkan tidak dapat memanfaatkan secara langsung produknya sendiri, melainkan harus dijual untuk membeli kebutuhan, termasuk bahan pangan. Maka perkebunan rakyat memerlukan pasokan bahan pangan dari daerah lain. Jika panen bersifat musiman, misalnya kebun kopi dan cengkeh, maka saat menunggu datangnya musim panen merupakan masa paceklik bagi petani. Sebaliknya saat musim panen, petani memiliki cukup uang untuk berbelanja sehingga perdagangan di pasar sangat meningkat, baik perdagangan hasil kebun maupun perdagangan sandang, pangan, dan sarana produksi pertanian.

Terkait dengan komoditas perkebunan sebagai komoditas perdagangan yang berorientasi ekspor maka komoditas perkebunan merupakan komoditas ekspor. Sampai saat ini berbagai jenis komoditas perkebunan merupakan sumber devisa yang penting bagi Indonesia hasil dari ekspor CPO kelapa sawit, karet remah, biji kopi, teh, kakao, lada, tembakau dan lain-lain. Khusus untuk gula tebu, produksi masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik kebutuhan pangan keluarga maupun kebutuhan industri yang sebagian bahkan masih mengimpor gula rafinasi. Sebagai komoditas ekspor maka harga komoditas perkebunan mengikuti pergerakan harga di luar negeri yang umumnya berfluktuasi. Kenaikan harga global terjadi jika permintaan naik atau karena penurunan produksi di

negara produsen utama, misalnya harga kopi dunia naik karena perkebunan kopi di Brasil rusak akibat dilanda embun beku (*frost*). Untuk sampai ke perusahaan eksportir, komoditas dari perkebunan rakyat melewati rantai pemasaran yang panjang sehingga memperkecil harga yang diterima petani. Harga di terima petani juga banyak ditentukan oleh kebijakan pabrik atau eksportir.

Tanaman perkebunan umumnya dibudidayakan di lahan kering sebab di lahan beririgasi lebih menguntungkan ditanam tanaman pangan atau tanaman hortikultura semusim, kecuali tanaman tebu dan tembakau yang tetap banyak ditanam di lahan sawah beririgasi. Sebagian tanaman perkebunan masih dapat ditanam di lahan marginal terutama tanaman kelapa sawit, karet, dan tebu. Tanaman kelapa sawit dapat ditanam di lahan gambut dan di lahan kering dengan produktivitas yang tinggi mencapai 24 ton tandan buah segar per hektar terutama apabila curah hujan merata sepanjang tahun. Umumnya sebagai tanaman keras, tanaman perkebunan mempunyai perakaran yang dalam dan luas dan mampu bertahan di kekeringan musim kemarau, sehingga pertumbuhan kembali pulih pada musim hujan. Tanaman tebu merupakan tanaman dengan sistem fotosintesis C4 sehingga beradaptasi luas dan produktivitas tinggi mencapai 100 ton tebu per hektar.

1.2 Azas dan Misi Perkebunan

Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2004, perkebunan diselenggarakan berdasarkan azas: (1) manfaat, (2) berkelanjutan, (3) keterpaduan, (4) keterbukaan, (5) berkeadilan. Sedangkan tujuan atau misi perkebunan adalah: (1) meningkatkan pendapatan masyarakat, (2) meningkatkan penerimaan negara, (3) meningkatkan penerimaan devisa negara, (4) menyediakan lapangan kerja, (5) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, (6) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, (7) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Asas dan misi yang diamanatkan undang-undang tersebut perlu ditegakkan oleh semua pemangku kepentingan terutama pemerintah dan perusahaan besar. Bahwa perkebunan dioperasikan agar semua pihak mendapatkan manfaat, termasuk warga masyarakat di sekitar perkebunan yang terangkat penghidupannya dari kemiskinan. Izin HGU diberikan kepada perusahaan bukan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dan keuntungannya dibawa ke luar negeri oleh pemilik modal (*asing*) serta dinikmati para petinggi dan karyawan perusahaan serta para pejabat pemerintah. Azas dan misi perkebunan berkelanjutan juga perlu terus dikampanyekan dan ditegakkan. Selain menjaga produksi agar berkelanjutan dan menguntungkan, perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan, termasuk menjaga sumberdaya lahan dan air, berusaha mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, menjaga harmonisasi sosial agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat sekitar terutama terkait dengan pembebasan lahan, kesempatan kerja, sistem pengupahan, infrastruktur dan pencemaran lingkungan. Semua itu adalah bagian dari asas pertanian berkelanjutan yang meliputi azas ekologi, ekonomi, dan sosial. Basyar (1999) memberi contoh kerugian lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan perusahaan perkebunan besar. Muttaqien *et al.* (2012) mengupas konflik sosial akibat pengembangan perkebunan besar kelapa sawit. Asas dan misi keberlanjutan inilah yang merupakan amanat undang-undang menjadi sudut pandang pembahasan buku ini.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Perkebunan

Arah pembangunan perkebunan disusun dan ditinjau kembali setiap kali penyusunan rencana pembangunan perkebunan jangka menengah (5-10 tahun) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan pertanian jangka panjang (25 tahun). Visi pembangunan perkebunan jangka menengah 2010-2014 adalah “Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan” (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010). Untuk mencapai visi tersebut disusun langkah-langkah atau dijabarkan sebagai misi pembangunan perkebunan yang juga merupakan penjabaran misi pembangunan pertanian di subsektor perkebunan.

Misi pembangunan perkebunan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan jangka menengah 2010-2014 adalah:

- (1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan;
- (2) Memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi;
- (3) Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan;
- (4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan;
- (5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi;
- (6) Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif.

Selain menetapkan visi dan misi pembangunan perkebunan, dalam rencana strategis pembangunan perkebunan jangka menengah, Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan pembangunan perkebunan untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian. Tujuan pembangunan perkebunan jangka menengah 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010):

- (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;
- (2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
- (3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan;
- (4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
- (5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
- (6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;
- (7) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
- (8) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan;
- (9) Meningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
- (10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

1.4 Pola Pengembangan Perkebunan

Berdasarkan pola pengusahaan, perkebunan dibedakan menjadi pola (1) perkebunan rakyat, (2) perkebunan besar yang terdiri dari perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta, dan (3) kemitraan seperti pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan pola kemitraan KKPA. Pola PIR di subsektor perkebunan dimulai pada tahun 1977 dengan program tebu rakyat intensifikasi (TRI) dan PIR-Perkebunan yang pada dasarnya merupakan upaya pemerintah agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara perkebunan besar (BUMN dan swasta) dengan perkebunan rakyat. Pola PIR berkembang dimulai dari pola Nucleus Estate Smallholder (NES), PIR-Khusus, PIR-Bantuan, dan PIR-Trans yaitu pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi (Ahmad, 1998). Pola PIR merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan perkebunan swasta sebagai perusahaan inti dan pelaksana pengembangan kebun plasma. Secara rinci pekerjaannya meliputi tiga tahap: (1) perusahaan inti melaksanakan pembangunan kebun; kedua, pengalihan kebun kepada petani plasma dan akad kredit konversi; ketiga, pengembalian atau pelunasan kredit.

Pola kemitraan perkebunan perlu terus diperbaiki terutama untuk memberdayakan petani mitra (Fajar, 2006). Pola kemitraan perkebunan saat ini memiliki tiga pola, yaitu pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), pola Kredit Koperasi Primer kepada Anggota (KKPA), dan pola Program Revitalisasi Perkebunan (PRP). Ketiga pola ini, sama-sama membangun dasar kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab, dan saling ketergantungan dengan masyarakat di sekitar perkebunan sebagai plasma (Sunarko, 1999). Pola kemitraan perkebunan KKPA melibatkan instrument baru yaitu koperasi yang juga memberi pengaruh pada tahapan pembangunan kebun. Masyarakat melalui lembaga Koperasi secara hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan kerjasama

kebun kemitraan. Masyarakat Desa melalui Koperasi merupakan pemilik lahan yang dimitrakan kemudian dikelola oleh perusahaan. Pola kemitraan di perkebunan tebu ditopang oleh kelembagaan yang terdiri atas petani, kelompok tani, KUD, dan PG. Fungsi/peran dari masing-masing lembaga diatur secara transparan, baik itu kesepakatan atau mekanisme, prosedur, serta sistem *reward-punishment* dari setiap mekanisme tersebut (Susila, 2012).

Pola kemitraan KKPA timbul sebagai perbaikan atas pola PIR. KKPA adalah pola kemitraan berbasis koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti harus melaksanakan pembangunan kebun untuk petani dengan biaya pembangunan dari kredit bank hingga tanaman menghasilkan. Perusahaan inti juga membangun kelembagaan petani sebagai sarana pembinaan dan bimbingan budi daya dan manajemen perkebunan. Pembinaan minimum dilakukan selama satu siklus tanam. Kemitraan pola Program Revitalisasi Perkebunan (PRP) merupakan pola kemitraan perkebunan disiapkan oleh pemerintah pada tahun 2006 dengan konsep kemitraan bertolak dari prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan antara perusahaan inti dan petani plasma. Perusahaan inti pada pola ini harus membangun kebun dengan penyediaan dana sendiri, sehingga perannya menjadi lebih nyata sampai perwujudan kebun dan lunasnya kredit petani (Johannes dan Suharto, 2011).

Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis mampu memberikan manfaat, antara lain: 1) meningkatkan produksi pertanian secara moderat, stabil, dan berkesinambungan, 2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, 3) meringankan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di pedesaan, 4) meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial, 5) menciptakan kerja dan lapangan berusaha, 6) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, 7) meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis, serta 8) melestarikan kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan (Saptana dan Ashari, 2007).

1.5 Perkebunan Sebagai Penghasil Bahan Baku

Berdasarkan pendekatan produk yang dihasilkan sebagai bahan baku industri, lingkup tanaman perkebunan antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. Tanaman penghasil minyak dan biofuel seperti kelapa, kelapa sawit, dan jarak. Tanaman penghasil pemanis seperti tebu, stevia, nipah dan aren. Tanaman penghasil serat antara lain kapas, kapuk, jute, rosela, rami, sisal. Tanaman penghasil bahan minuman dan penyegar (*bverages*): kopi, teh, kakao, kola, dan tembakau. Tanaman penghasil rempah antara lain lada, cengkeh, pala, ketumbar, kayu manis, jahe, kunyit. Tanaman penghasil obat: kina, empon-empon, purwoceng, mengkudu, cabe jawa, sirih, tempuyung, kumis kucing, sambiloto. Tanaman penghasil minyak atsiri: serai, akar wangi, nilam, minyak kayu putih.

Ke depan klasifikasi penghasil bahan baku semakin general dan produksinya berbasis biomassa. Misalnya perkebunan sebagai penghasil bioenergi yang meliputi kelompok tanaman penghasil minyak nabati (kelapa, kelapa sawit) dan biofuel (jarak) serta kelompok penghasil etanol seperti tebu, nipah, aren, dan singkong. Perkebunan penghasil biomaterial meliputi penghasil serat, kayu, kayu bakar, pulp kertas, karet, pelumas, dan bioplastik. Perkebunan penghasil fitofarmaka yang meliputi semua komoditas tanaman dan tumbuhan yang dapat menghasilkan materi obat, vitamin dan suplemen, dan kosmetik. Perkebunan penghasil pangan seperti penghasil pemanis, karbohidrat, minyak goreng, pewarna pangan, bumbu, minuman penyegar, dan ternak sapi. Disini tampak bahwa orientasi usaha berbasis komoditas terlebih komoditas tunggal semakin kurang berorientasi ke depan dibandingkan dengan orientasi berbasis produk. Satu komoditas dapat menghasilkan banyak bahan baku produk industri, biomassa dan limbahnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau sumber bioenergi (pakan ternak). Mengusahakan satu produk berbasis biomassa akan dihasilkan rantai produk dan dapat disinergikan dengan komoditas lain sehingga rantai produk semakin panjang dan siklus yang lebih tertutup. Perusahaan atau kelompok perusahaan akan menghasilkan banyak produk dari berbagai tanaman dan ternak secara terpadu.

1.6 Pendorong Pembangunan Wilayah

Salah satu tujuan pembangunan perkebunan adalah mendorong pengembangan wilayah. Pembangunan perkebunan selain berfokus pada pengembangan agribisnis komoditas juga berorientasi kepada pembangunan wilayah. Artinya usaha perkebunan di suatu wilayah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan ekspor komoditas sehingga perusahaan perkebunan mengeruk laba dan berkembang pesat melainkan juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal, memanfaatkan sumberdaya lokal, mengembangkan program kemitraan perkebunan, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia lokal, dan menyediakan lapangan kerja terutama bagi masyarakat lokal. Dengan demikian adanya usaha perkebunan (besar) memberi *multiplier effect* yang mendorong pengembangan wilayah. Apabila upaya luhur ini dilaksanakan maka wilayah di sekitar perusahaan perkebunan ikut tumbuh berkembang, desa-desa miskin di sekitar perkebunan semakin berkurang, hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar berjalan harmonis dan jauh dari konflik. Kondisi semacam ini juga kembali akan menguntungkan perusahaan karena operasional perkebunan berjalan lancar. Tidak ada konflik perusahaan dengan masyarakat sekitar merupakan salah satu syarat sertifikasi perkebunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah sangat berkepentingan agar pemilik modal mau membangun perkebunan di wilayahnya. Pemerintah memetakan dan menyediakan lahan untuk membangun perkebunan. Hal ini antara lain karena pembangunan perkebunan khususnya perkebunan besar akan dapat berperan sebagai dinamisator pembangunan wilayah. Wilayah pelosok yang terpencil, tertinggal, kurang produktif, didominasi oleh semak belukar diharapkan akan lebih cepat berkembang dengan hadirnya investasi perkebunan besar. Di sekitar perkebunan akan tumbuh wilayah perkembangan baru yang ditandai dengan pemekaran wilayah administratif yaitu tumbuh desa-desa baru, kecamatan pemekaran, bahkan akan muncul kabupaten baru.

Lampung merupakan contoh aktual banyaknya pemekaran wilayah yang didorong oleh pembangunan perkebunan. Dimulai dari berdirinya Kabupaten Lampung Barat yang merupakan sentra perkebunan kopi rakyat, memecah dari Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1991 berdasarkan UU No. 6 tahun 1991. Pada tahun 1997 Kabupaten Lampung Utara melahirkan kabupaten baru yaitu Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU no 2 Tahun 1997. Sebelas tahun kemudian yaitu tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan dan dibentuk dua kabupaten baru sekaligus, yaitu Kabupaten Mesuji berdasarkan UU No 49 Tahun 2008 dan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan UU No 50 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Tulang Bawang banyak investor besar seperti perkebunan tebu, kelapa sawit, dan tambak udang. Sedangkan karet merupakan unggulan untuk perkebunan rakyat.

Dari sudut pandang pembangunan wilayah, perkebunan antara lain berperan pada:

- (1) Mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sehingga meningkatkan aksesibilitas wilayah, baik yang dibangun oleh pemerintah, swasta, maupun swadaya masyarakat.
- (2) Mendorong pembangunan kelembagaan seperti pasar, bank, KUD, sekolah, dan rumah sakit.
- (3) Meningkatkan kegiatan ekonomi wilayah, baik barang maupun jasa seperti usaha perdagangan, industri, agribisnis, dan agrowisata.
- (4) Meningkatkan eksploitasi sumberdaya alam seperti lahan, hutan, sungai, flora dan fauna.
- (5) Mendorong mobilisasi sumberdaya manusia, yang berdatangan dari dalam propinsi maupun luar propinsi bahkan warga negara asing sebagai akibat dari meningkatnya aksesibilitas dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Peranan pemerintah dan instansi yang terkait adalah agar kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan serta semua peraturan dan perundang-undangan agar dipatuhi semua pihak. Dengan demikian wilayah berkembang secara terencana dengan arah yang benar sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.7 Pendorong Agrowisata

Pembangunan agrowisata mendapat perhatian pemerintah dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian (No. 204/KPTS/HK.050/4/1989) dan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (KM.47/PW 004/MPPT

1989). Keputusan tersebut menjadi landasan pengembangan wisata agro yaitu menyebutkan bahwa sektor pertanian dimanfaatkan untuk wisata agro dan sekaligus promosi pertanian. Aktivitas wisata agro tetap memperhatikan lingkungan hidup dan kelestarian alam serta tetap terjaminnya kepentingan usaha tani.

Sektor pariwisata dapat diharapkan menjadi penggerak perekonomian wilayah dan penghasil devisa bagi negara, karena mendorong pertumbuhan banyak usaha yang lain seperti perhotelan, *homestay*, transportasi, restoran, kerajinan, kuliner, dan pertunjukan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama perkotaan maka minat masyarakat untuk berkunjung ke lokasi agrowisata semakin meningkat. Aktivitas agrowisata selain akan mendorong kegiatan usaha seperti yang disebut di atas sehingga menumbuhkan ekonomi pedesaan, bagi usahatani merupakan sarana promosi dan pemasaran serta mendorong perkembangan potensi diversifikasi komoditas khas, pengolahan, dan diferensiasi produk.

Berkembangnya agrowisata Indonesia dimulai dengan agrowisata perkebunan teh di kawasan Puncak, Jawa Barat. Hal ini menunjukkan potensi sektor perkebunan untuk menyiapkan produk wisata yang menarik yang bersinergi dengan sektor wisata lainnya seperti ekowisata, wisata edukasi, wisata sejarah, wisata konferensi, wisata pedesaan, dan wisata minat khusus. Potensi perkebunan sebagai tujuan agrowisata sangat besar yang perlu dimanfaatkan semua pihak terkait termasuk Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat. Perkebunan mempunyai daya tarik sebagai tempat wisata karena:

- (1) Memiliki panorama yang indah dan khas didukung suasana yang nyaman, sejuk, dan jauh dari rutinitas dan kebisingan kota.
- (2) Dekat dengan sumberdaya alam yang indah seperti hutan, gunung, sungai, danau, atau air terjun.
- (3) Tersedia jalan serta rute wisata serta didukung sarana dan prasarana terutama di perusahaan perkebunan.
- (4) Aktivitas produksi yang riil siap untuk dikunjungi wisatawan, meliputi kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan di pabrik.
- (5) Aktivitas keseharian komunitas perkebunan menarik bagi masyarakat di luar perkebunan.
- (6) Proses produksi dan teknologi yang diterapkan perkebunan menarik untuk penyelenggaraan wisata edukasi baik untuk tingkat pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi, dan umum. Fasilitas wisata edukasi ini seharusnya merupakan layanan perkebunan untuk mencerdaskan anak bangsa.
- (7) Produk yang dihasilkan perkebunan dapat disuguhkan di lapangan atau dijual sebagai oleh-oleh.
- (8) Perusahaan perkebunan memiliki kaitan historis dengan perkembangan perkebunan zaman kolonial Belanda dimana perlengkapan dan bangunannya masih dapat dilihat sampai saat ini.

Salah satu target pasar objek agrowisata sejarah adalah para wisatawan manca negara yang berasal dari negara yang secara historis memiliki hubungan dengan sejarah perkembangan perkebunan masa lalu seperti Belanda, Eropa secara umum, dan Jepang. Agrowisata perkebunan merupakan salah satu produk samping perusahaan dalam rangka diversifikasi usaha dan meningkatkan pendapatan. Produk wisata tersebut dapat menjadi pilar penting dalam bisnis perusahaan perkebunan jika dikelola secara profesional. Belum banyak perusahaan besar perkebunan yang mengelola bisnis ini karena tetap fokus pada bisnis inti dan tidak ingin lokasi dan teknologi banyak diakses oleh khalayak umum.

1.8 Eksploitasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam meliputi tanah, air, dan udara serta apa yang terkandung di dalamnya baik mineral dan bahan lain serta makhluk hidup baik flora, fauna, dan mikroorganisme. Penyelenggaraan perkebunan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan amanat UU No. 18 Tahun 2004. Eksploitasi sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan sebagai akibat negatif dari perkembangan perkebunan sering menjadi fokus kritik oleh aktivis lingkungan baik nasional maupun internasional. Issu lingkungan kemudian digunakan sebagai isu perdagangan komoditas perkebunan. Hal ini dapat mengancam ekspor Indonesia jika produk perkebunan ditolak karena dianggap tidak ramah lingkungan. Negara atau perusahaan pengimpor membuat regulasi dan lembaga sertifikasi eco-labelling sebagai bagian dari strategi bisnis untuk menjaga pasokan bahan baku sesuai dengan persyaratan mereka sekaligus membangun citra positif kepada konservasi lingkungan.

Eksplorasi sumber daya alam yang sesuai dengan daya dukung lingkungan adalah hal yang positif sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kawasan pengembangan perkebunan umumnya terletak berbatasan dengan kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi. Perkebunan merupakan bisnis lahan yaitu bisnis yang membuka dan mengembangkan lahan yang luas. Yang menjadi masalah adalah jika perluasan perkebunan tumpang tindih dengan kawasan hutan dan perkebunan diklaim sebagai penggundul atau perambah hutan. Kendatipun pembukaan lahan perkebunan tidak masuk dalam kawasan hutan negara, maka negara Barat tetap akan mengkritik karena perkebunan membabat (tegakan) hutan, yang merupakan habitat hewan liar seperti orang hutan, harimau, gajah, badak, reptil, dan burung. Pembukaan hutan juga menghilangkan keragaman hayati yang tidak dapat dinilai harganya secara ekonomi. Tegakan hutan yang tadinya ditempati berbagai jenis flora dan fauna kemudian berubah menjadi monospesies seperti kelapa sawit, tebu, kopi, kakao atau karet. Pembukaan lahan yang massif umumnya dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar. Hal inilah yang banyak dikritik oleh aktivis lingkungan. Sementara pemerintah terus mengeluarkan izin HGU yang baru untuk investor perkebunan terutama kelapa sawit.

Kalau tegakan hutan tidak boleh dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat, apakah ada alternatif untuk memberi makan masyarakat? Masalahnya adalah hutan Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia dan *hot spot* keragaman hayati yang harus dilestarikan. Negara industri menghasilkan emisi karbon yang besar, dan negara berkembang diminta untuk mengkonservasi hutan sebagai menyerap karbon dan tidak boleh dialih fungsikan menjadi perkebunan, apakah ini adil? Pemikiran alternatif yang ditawarkan para ahli antara lain misalnya: (1) mengembangkan perkebunan rakyat yang lebih ramah lingkungan seperti perkebunan karet yang akan membentuk hutan karet, (2) mendorong perkebunan campuran antara komoditas penghasil nonkayu dan kayu yang disebut agroforestri, (3) mengembangkan ekowisata, (4) mengikuti skema perdagangan karbon.

1.9 Sistem Produksi Perkebunan

Perkebunan Eksploitasi

Sebagaimana usaha pertambangan, usaha perkebunan dan perhutanan juga mengeksploitasi sumber daya alam. Terminologi eksploitasi dapat bermakna positif yang berarti mengusahakan atau mendayagunakan, dapat bermakna negatif yaitu mengeruk dan memeras (kekayaan, sumber daya, tenaga). Pada kenyataannya praktek eksploitasi di perkebunan masih dilakukan oleh sebagian perusahaan.

Perkebunan ekstraksi adalah sistem produksi perkebunan yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran baik lahan, air tanah, sungai, danau, hutan, pupuk, tenaga kerja untuk menghasilkan produk secara massal dan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan. Lahan yang dieksploitasi bukan semakin subur, melainkan terdegradasi ditandai dengan kandungan C organik yang semakin menurun, lapisan atas yang semakin tipis, dan terbentuknya lapisan tanah yang keras akibat pengoperasian alat berat yang intensif selama puluhan tahun. Sumur penduduk di sekitar perkebunan mengering di musim kemarau bersamaan dengan semakin intensifnya penyedotan air tanah untuk irigasi curah perkebunan. Demikian juga sungai dan danau semakin cepat mengering di musim kemarau sementara di musim hujan airnya keruh akibat erosi tanah dari perkebunan. Di musim hujan perusahaan membiarkan kolam-kolam pengolahan limbah mengalirkan langsung ke pembuangan dan mencemari sungai.

Perkebunan Produksi Bersih

Produksi bersih didefinisikan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimisasi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Dalam penerapannya produksi bersih memberikan keuntungan seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya pengolahan limbah, konservasi bahan baku dan energi, membantu akses kepada lembaga finansial, memenuhi permintaan pasar, memperbaiki kualitas lingkungan, memenuhi peraturan lingkungan, memperbaiki lingkungan kerja, dan meningkatkan persepsi masyarakat.

Pola pendekatan produksi bersih dalam melakukan pencegahan dan minimisasi limbah yaitu:

- (1) *Elimination* (pencegahan) adalah upaya untuk mencegah timbulnya limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai produk.
- (2) *Reduce* (pengurangan) adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi limbah yang dihasilkan dalam suatu kegiatan.
- (3) *Reuse* (pakai ulang/penggunaan kembali) adalah upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia atau biologi.
- (4) *Recycle* (daur ulang) adalah upaya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula melalui perlakuan fisika, kimia dan biologi.
- (5) *Recovery/ Reclaim* (pungut ulang, ambil ulang) adalah upaya mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia dan biologi.

Perkebunan Konservasi

Pertanian konservasi (*conservation agriculture*) lahan adalah sistem pertanian yang berprinsip pada: (1) minimasi gangguan terhadap tanah, (2) penutupan tanah secara organik yang permanen, (3) diversifikasi tanaman, yaitu rotasi tanaman untuk pertanaman semusim dan pertanaman campuran untuk pertanaman menahun. Sistem ini menekankan pada upaya pelestarian pemanfaatan lahan semaksimal mungkin sepanjang tahun untuk meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan) dengan memperhatikan kaidah dan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air seperti terasering, pembuatan guludan dan penanaman tanaman penguat teras (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2011). Secara lebih luas, perkebunan konservasi adalah perkebunan yang melaksanakan semua tindakan konservasi lingkungan baik konservasi lahan maupun konservasi keragaman hayati (*biodiversity*).

Perkebunan konservasi bersifat ramah lingkungan, tidak ekstraktif, dan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan berdasar prinsip umum yaitu *reduce, reuse, dan recycle*. Lahan yang dikelola perkebunan tetap dipertahankan kesuburannya dengan menerapkan: (1) pengolahan tanah secara minimal dan mengurangi pengoperasian alat berat, (2) pengelolaan tanaman secara terpadu dengan menanam tanaman penutup tanah, melakukan pergiliran tanaman di antara beberapa komoditas yang diusahakan oleh perkebunan, mengembalikan sisa panen dan limbah pengolahan hasil panen ke lahan, (3) usaha perkebunan terpadu (terintegrasi) yaitu menghasilkan beberapa komoditas termasuk kayu dan ternak yang memanfaatkan sebagian hasil limbah biomassa dan rumput yang dihasilkan serta pupuk kandang yang dihasilkan sebagai sumber pupuk.

Perkebunan menaruh perhatian terhadap upaya konservasi keragaman hayati baik tumbuhan maupun hewan dengan menyisakan sebagian lahan di dalam perkebunan tetap dibiarkan sebagaimana aslinya sebagai hutan hujan tropis yang kaya keragaman hayati. Hal yang tersulit adalah membiarkan hidup satwa yang dianggap sebagai hama perkebunan seperti monyet, siamang dan orang hutan. Jalur-jalur habitat flora dan fauna seperti jalur di perbatasan mengitari perkebunan, sempadan sungai dan sekitar rawa dan danau dipelihara sebagai jalur hijau dan penanaman pohon penghasil kayu.

Perkebunan Terintegrasi

Perkebunan terintegrasi merupakan implementasi konsep pertanian terpadu di subsektor perkebunan. Perkebunan baik dari segi produksi biomassa, agroekosistem, maupun kawasan memiliki potensi sumberdaya yang besar. Produksi biomassa berupa hijauan dan limbah hasil umumnya dapat dimanfaatkan untuk usaha ternak. Salah satu contoh adalah usaha integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi atau kambing. Kasawan perkebunan yang luas dan sumber pakan berupa hijauan maupun produk samping kelapa sawit yang tersedia merupakan potensi besar pengembangan ternak sapi dan kambing. Menteri BUMN mewajibkan seluruh PTPN kelapa sawit untuk memelihara ternak sapi dengan mematok 100.000 ekor sapi di 10 PTPN kelapa sawit. Ini sesuai dengan Surat Kementerian BUMN Nomor S-50/D1.MBU/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pola Integrasi Peternakan Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Menteri BUMN Nomor S-240/MBU/2012 tanggal 09 Mei 2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Program Integrasi Sapi Sawit.

Sebagai sumber energi dan protein adalah solid dan bungkil inti kelapa sawit. Sebagai sumber serat adalah, hijauan rumput dan LCC, pelepah daun, tandan kosong dan tepung umbut kelapa sawit hasil tebang pohon untuk replanting. Di sistem perkebunan Besar, di kebun kelapa sawit muda tersedia hijauan berupa rumput dan kacang tanah penutup tanah yang melimpah. Dengan pemupukan kelapa sawit yang intensif, LCC dan rumput alami tumbuh subur. Biasanya masyarakat desa sekitar perkebunan mencari hijauan di perkebunan untuk ternak. Saat ini perkebunan kelapa sawit telah memanfaatkan potensi itu untuk usaha ternak. Penggembalaan sapi di kebun kelapa sawit mengandung risiko kompaksi tanah dan daun kelapa sawit rusak karena dimakan sapi.

Perkebunan terintegrasi juga menerapkan konsep *reduce, reuse* dan *recycle (R3)*. Dengan harga BBM untuk usaha komersial yang semakin mahal, maka pemanfaatan tenaga sapi untuk mengangkut saprodi dan hasil panen menjadi alternatif pilihan. Tandan kosong, serat perasan, dan bungkil sawit diolah untuk pakan ternak, kotoran ternak digunakan sebagai penghasil biogas, dan sisa bahan organiknya dikembalikan ke lahan kebun untuk mempertahankan kesuburan tanah. Potensi besar pakan ternak juga terdapat pada usaha perkebunan tebu dengan memanfaatkan pucuk tebu sebagai pakan, perkebunan nanas dengan memanfaatkan limbah kulit buah, dan perkebunan kakao dengan memanfaatkan kulit buah kakao.

Table 1. Daftar komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan

No	Komoditas	Nama Latin
1.	Adas	<i>Foeniculum Volgare</i> Miller
2.	Akar wangi	<i>Andropogon zizanioides</i>
3.	Aren	<i>Arenga piñata</i>
4.	Asem jawa	<i>Tamarindus indica</i>
5.	Babadotan	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
6.	Barucina	<i>Artemisia vulgaris</i>
7.	Benalu Teh	<i>Loranthus</i> sp
8.	Bestru	<i>Luffa aegyptica</i>
9.	Biduri	<i>Colotropis gigantea</i>
10.	Bintan	<i>Cerbera manghas</i>
11.	Buah Makasar / Kwalot	<i>Brucea javanica</i>
12.	Bungur Kecil	<i>Lengstroemia indica</i> L.
13.	Cabe Jamu/ Cabe Jawa	<i>Piper retrofractum</i> vahl
14.	Cassiavera / Kayu Manis	<i>Cinnamomum burmanii</i> BI
15.	Cengkeh	<i>Eugenia aromatica</i> O.K.
16.	Coklat / Kakao	<i>Theobroma cacao</i>
17.	Daruju	<i>Acanthus ilicifolius</i>
18.	Daun Dewa	<i>Gynura Sagetum</i>
19.	Doro Putih	<i>Stryonos ligostrina</i>
20.	Galinggem	<i>Bixa orellana</i>
21.	Gambir	<i>Uncaria gambir</i> Roxb
22.	Gandapura	<i>Gaultheria fragratissima</i> Wall
23.	Gandarusa	<i>Justicia gendarusa</i>
24.	Gendola	<i>Bassella rubra</i> L.
25.	Getah Perca	<i>Ficus elastica</i>
26.	Ginje	<i>Thevetia peruviana</i> L.
27.	Ginseng	<i>Panax ginseng</i> C.A.
28.	Jambu Mete	<i>Annacardium occidentale</i>
29.	Jarak	<i>Ricinus communis</i> L.
30.	Jarak Merah	<i>Jatropha gossyfolia</i>
31.	Jarak Pagar	<i>Jatropha curcas</i>

No	Komoditas	Nama Latin
32.	Jarong	<i>Achyranthes aspera</i>
33.	Jenitri	<i>Elaccarpus angustifolia</i>
34.	Jinten	<i>Cuminum cyminum</i> L.
35.	Jojoba	<i>Zizyphus jujuba</i>
36.	Jombang	<i>Taraxacum mongolicum</i>
37.	Jute	<i>Corcharus canabinus</i>
38.	Kapas	<i>Gossypium hirsutum</i> L.
39.	Kapasan / Kasutri	<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik L.
40.	Kapok	<i>Ceiba petandra</i>
41.	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull
42.	Kasingsat	<i>Cassia occidentalis</i> L.
43.	Kayu Rapat	<i>Paramaria leavigata</i>
44.	Kayu Secang	<i>Caesalpinia sappan</i>
45.	Kayu Teja	<i>Cinnamomon culilawan</i>
46.	Kayu Ular	<i>Strychnos lucida</i>
47.	Keben	<i>Barringtonia asiatica</i> Kurz
48.	Kedawung	<i>Parkia biglobosa</i> Benth
49.	Kedoya	<i>Dysoxylum gandichandianum</i>
50.	Keji Beiling	<i>Reullia nafifera</i> Zool & Mar
51.	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i> L.
52.	Kelapa Sawit	<i>Elaeis guinensis</i> Jacq
53.	Kemanden Sewu	<i>Chrysanthemum cinclarifolium</i> Vis
54.	Kemenyan	<i>Styrax benzoin</i> Orynd
55.	Kemukus	<i>Piper cubeba</i> L.
56.	Kemuning	<i>Maruya paniculata</i> L. Jack
57.	Kenaf	<i>Hibiscus sinensis</i>
58.	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>
59.	Kenari	<i>Canarium amboinense</i> Hoch
60.	Keningar	<i>Cinnamomon cassia</i>
61.	Ketepeng Cina	<i>Cassia alata</i> L.
62.	Ketumbar	<i>Coriandrum sativum</i> L.
63.	Kikio	<i>Platicondon grandiflorum</i>
64.	Kina	<i>Cinchona</i> sp.
65.	Koka	<i>Erythroxyton novagranatense</i>
66.	Kalesom	<i>Talinum racemosum</i> R.
67.	Kopi	<i>Coffea</i> spp.
68.	Kumis kucing	<i>Orthosiphon grandiflora</i>
69.	Lada	<i>Piper nigrum</i> L.
70.	Legundi	<i>Vitex trifoliata</i> L.
71.	Lontar/Siwalan	<i>Borassus</i> sp. Linn
72.	Makadamia	<i>Macadamia</i> spp.
73.	Masoyi	<i>Massonia aromatic</i>
74.	Mendong	<i>Cyperus</i> sp
75.	Menthol	<i>Mentha arvensis</i> L.
76.	Mindi	<i>Melia azedarach</i> L.
77.	Mojo	<i>Aegle marmelos</i> L. Corr
78.	Nila	<i>Indigofera</i> Spp

No	Komoditas	Nama Latin
79.	Nilam	<i>Pogostemon cablin</i> Benth
80.	Nimba	<i>Azadirachia indica</i> Suss
81.	Nipah	<i>Nipa fructicans</i> Wurm
82.	Oyod	<i>Peron Anamirta cocolus</i> W & A
83.	Pala	<i>Myristica fragrans</i> (L.) Hoult.
84.	Pandan	<i>Pandanus</i> sp
85.	Panili	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews
86.	Pasak Bumi	<i>Eurycoma logifolia</i> Jack
87.	Patmasari	<i>Rafflesia zallingeriana</i>
88.	Pinang	<i>Areca catechu</i>
89.	Pisang manila	<i>Musa sextilis</i>
90.	Pranajiwa	<i>Euchresta horfeldii</i>
91.	Pulasari	<i>Alxia reinwardii</i>
92.	Rami	<i>Boehmeria nivea</i> Gaud
93.	Rangga Dipa	<i>Clerodendron indicum</i>
94.	Rangas	<i>Gluta renghas</i> L
95.	Rincik Bumi	<i>Quamoclit pennata</i>
96.	Rosella	<i>Hibiscus sabdariffa</i>
97.	Sagu	<i>Mitroxylum sagu</i> Rottb
98.	Salah Nyowo	<i>Polygonum barbatum</i> L.
99.	Sambung Doro	<i>Excoecaria cochinnensis</i>
100.	Sawi Tanah	<i>Nasturtium mantanum</i>
101.	Senggani	<i>Melastoma candidum</i>
102.	Sengketan	<i>Heliotropium indicum</i>
103.	Sereh Wangi	<i>Andropogon nardus</i> L.
104.	Siantan	<i>Ixira stricta</i>
105.	Sidagori	<i>Sida rhombifolia</i>
106.	Sintok	<i>Cinnamomum sintoc</i> Bl.
107.	Sisal/Agave	<i>Sisalana perrine</i>
108.	Stepanot Jingga	<i>Phyrostegia venusta</i>
109.	Stevia	<i>Stevia rebaudiana</i>
110.	Tabat Barito	<i>Ficus deltoidea</i>
111.	Tanaman penutup tanah	
112.	Tanaman pupuk hijau	
113.	Tebu	<i>Saccharum officinarum</i> L.
114.	Teh	<i>Camellia sinensis</i>
115.	Teki	<i>Cyperus rotundus</i>
116.	Tembakau	<i>Nicotiana tabacum</i> L.
117.	Tingeh	<i>Antiaris toxicaria</i> Leoch
118.	Trengguli	<i>Cassia fistula</i> L
119.	Tuba	<i>Derris elliptica</i> Benth
120.	Tung Oil/Kemiri	<i>Aleurites mollucana</i> Willd
121.	Turi	<i>Sesbania grandiflora</i>
122.	Ubi Benggala	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.
123.	Urang Aring	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.
124.	Waru Landak	<i>Hibiscus mutabilis</i>
125.	Wijen	<i>Sesamum indicum</i> Linn
126.	Ylang-ylang	<i>Cananga latifolia</i>

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. 1998. *Perkebunan dari NES ke PIR*. Puspa Swara. Jakarta.
- Basyar, A.H. 1999. *Perkebunan Besar Kelapa Sawit*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2010. *Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014*. Jakarta.
- Effendi D.S. 2010. *Prospek pengembangan tanaman aren (Arenga pinnata Merr) mendukung kebutuhan bioetanol di Indonesia*. Perspektif 9(1): 36-46.
- Evizal, R. and F.E. Prasmatiwi. 2011. *Agrotourism potential and sustainable agriculture in Lampung*. Proceedings International Seminar on Agro-tourism Development (ISAD). p. 339-348.
- Fajar, U. 2006. *Kemitraan usaha perkebunan: Perubahan struktur yang belum lengkap*. Forum Penelitian Agro Ekonomi 24(1): 46-60.
- Iskandar, J. 1992. *Ekologi Perladangan di Indonesia, Studi Kasus dari daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat*. Djambatan. Jakarta.
- Johannes dan Suharto. 2011. *Pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan*. Ganda Link 1(3):18-20.
- Maddox, T., D. Priatna, E. Gemita, A. Salampessi. 2007. *The conservation of tiger and others wildlife in oil palm plantations*. ZSL Conservation Report No. 7.
- Muttaqien, A., N. Ahmad, dan W. Wagiman. 2012. *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*. Elsam-Sawit Watch-Pilnet. Jakarta.
- Owenya, M., W. Mariki, A. Stewart, T. Friedrich, J. Kienzle, A. Kassam, R. Shetto, and S. Mkomwa. 2012. *Conservation agriculture and sustainable crop intensification in Karatu District, Tanzania*. Integrated Crop Management. 15: 1-40.
- Rappole, J.H., D.I. King, J.H.V. Rivera. 2003. *Coffee and conservation*. Conservation Biology 17: 334-336.
- Saptana dan Ashari. 2007. *Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha*. Jurnal Litbang Pertanian 26(4): 123-130.
- Sastrahidajat, I.R. dan Soemarno D.S. 1991. *Budidaya Tanaman Tropika. Usaha Nasional*. Surabaya. 524 hlm.
- Susila, W.R. 2002. *Dengan kemitraan, pabrik gula dan petani maju bersama*. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Indonesia 24(5): 10-12.
- Syahza, A. 2011. *Percepatan ekonomi pedesaan melalui pembagunan perkebunan kelapa sawit*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 12(2): 297-310.
- Syamsulbahri. 1996. *Bercocok Tanam Tanaman Perkebunan Tahunan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sunarko. 2009. *Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- Su'ud, M.H. 2012. *Pemanfaatan sumberdaya alam dan hari depan pertanian Indonesia*. www.perhepi.org/images/stories/publikasi/buku_perhepi/hassan.pdf.

B A B I I

SEJARAH PERKEBUNAN

Perkembangan subsektor perkebunan Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kolonialisme atau penjajahan oleh Bangsa Belanda. Keberhasilan Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad untuk membangun negerinya menunjukkan pentingnya peran Hindia Belanda (Indonesia) dengan perekonomian berbasis perkebunan. Jejak peninggalan perkebunan Belanda masih dapat dilihat sampai saat ini baik berupa fisik usaha perkebunan yang telah dinasionalisasi, bangunan, teknologi, maupun sistem manajemen kolonial.

Sejarah akan dapat berulang sehingga untuk membangun perkebunan yang maju dan memberi manfaat maka sejarah harus dipelajari. Perkebunan Indonesia pernah berjaya di masa kolonial, namun sampai saat ini belum dapat diraih kembali. Sistem perkebunan kolonial banyak mengandung kenangan buruk, tetapi juga memiliki kebaikan setidaknya sebagai refleksi agar kejadian itu tidak terulang kembali. Bab ini berusaha menyajikan bagian penting dari sejarah perkebunan (Kartodirdjo dan Suryo, 1991) serta perkembangan perkebunan dan litbang perkebunan sampai saat ini.

2.1 Perkebunan pada Zaman VOC

Kedatangan bangsa Barat seperti Portugis, Inggris, dan Belanda ke Indonesia bermula dari usaha perdagangan rempah-rempah yang dibutuhkan. Indonesia sebagai daerah tropis merupakan daerah asal tanaman rempah tersebut atau dikenal merupakan penghasil rempah tertentu sejak Zaman Hindu. Para pedagang Indonesia, India, dan Cina menjalankan kegiatan perdagangan internasional untuk memenuhi permintaan rempah-rempah di pasar Eropa yang terus meningkat. Perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan tersebut mengundang kehadiran kekuatan asing di Nusantara.

Pada masa prakolonial, rempah dihasilkan dari kebun yang merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional. Sistem kebun tradisional lebih sebagai budidaya tambahan dari kegiatan pertanian subsisten terutama tanaman pangan dan hortikultura. Sistem kebun tradisional bercirikan pengelolaan sederhana oleh keluarga petani, pola tanam campuran, struktur vegetasi tanaman seperti hutan. Sistem perkebunan seperti yang ada saat ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh korporasi asing dan oleh pemerintah kolonial. Sistem perkebunan ini merupakan sistem pertanian komersial yang pada awal pengembangannya bercorak kolonial dan kapitalistik.

Sistem perkebunan memperkenalkan berbagai pembaruan dalam sistem perekonomian agraris yang membawa dampak perubahan penting kehidupan masyarakat tanah jajahan. Sistem perkebunan bercirikan bentuk usaha pertanian

berskala besar dan kompleks yang padat modal, mengusahakan areal lahan yang luas, organisasi kerja yang besar, pembagian kerja rinci, struktur hubungan kerja yang rapi, menggunakan tenaga kerja upahan, menggunakan teknologi modern, adanya spesialisasi dan sistem administrasi-birokrasi, dan mengusahakan tanaman komersial yang ditujukan sebagai komoditas ekspor.

Kehadiran Bangsa Belanda di Indonesia dimulai dengan pembentukan Gabungan Perseroan Dagang India Timur atau Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602. VOC melakukan monopoli dagang melalui berbagai jalan seperti: (1) penaklukan dan kekerasan, (2) kontrak monopoli, dan (3) atas dasar persetujuan atau perdagangan bebas. Sistem eksploitasi komoditas perdagangan dilakukan dengan sistem leveransi wajib dan sistem kontingensi.

Pada sistem leveransi wajib, pemimpin daerah taklukan menyerahkan komoditas dan VOC membeli dengan harga tertentu. Pada sistem kontingensi, pemimpin diwajibkan menyerahkan komoditas dalam jumlah yang ditetapkan, dan VOC akan memberi sedikit pembayaran atau tidak sama sekali. Kedua sistem ini mirip dengan sistem upeti dari daerah taklukan kepada raja pada sistem feodal.

Selain itu VOC membangun perkebunan untuk komoditas baru seperti kopi dan tebu yang dianggap memiliki prospek cerah. Jauh sebelum ada sistem tanam paksa, VOC telah melakukan sistem penanaman wajib yang mirip tanam paksa yaitu penanaman kopi di daerah Priyangan. Yang kemudian diperluas di daerah Ambon dan Pekalongan. Organisasi pelaksanaan penanaman wajib ini diserahkan kepada para bupati. Dengan cara paksa penduduk diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rodi untuk pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pengangkutan kopi dari kebun ke tempat penampungan untuk kemudian diserahkan kepada VOC.

2.2 Perkebunan pada Zaman Hindia Belanda

Setelah sistem sewa tanah yang telah dilaksanakan hampir selama 20 tahun dianggap gagal meningkatkan perekonomian pemerintah kolonial dan didorong oleh keadaan keuangan Negeri Belanda yang tengah kesulitan dalam pengembalian hutang maka Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 mencetuskan sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel*. Dalam sistem ini petani dipaksa menanam komoditas yang diminta pemerintah di tanah mereka sendiri. Komoditas yang termasuk program tanam paksa adalah kopi, tembakau, tebu, teh, lada, indigo (pewarna), kayu manis, dan kina.

Selain membawa kesengsaraan bagi petani, sistem tanam paksa memiliki dampak positif terhadap perkembangan perkebunan di Indonesia. Dampak tersebut antara lain:

- (1) Perluasan perkebunan rakyat pada komoditas tanam paksa seperti kopi, teh, kayu manis, dan lada yang ditanam di lahan hak *eigendom* (milik) rakyat.
- (2) Peningkatan produksi dan ekspor perkebunan, bahkan Indonesia (Hindia Belanda) berhasil menjadi negara produsen utama beberapa komoditas perkebunan seperti kopi, tembakau, tebu, dan lada yang diekspor ke pasar Eropa.
- (3) Petani menguasai teknologi budidaya tanaman baru.
- (4) Rakyat mengenal sistem perkebunan komersial.

Atas desakan politik di dalam negeri Belanda, sistem tanam paksa secara berangsur-angsur dihapus. Antara lain pada tahun 1865 dihapus tanam paksa indigo, teh, kina, dan kayu manis. Kemudian tanam paksa tembakau dihapus pada tahun 1866, tebu dihapus pada tahun 1870, dan terakhir kopi dihapus pada tahun 1916. Sebagian kecil perkebunan teh, kina, dan gutta percha yang ditanam pada zaman Hindia Belanda masih dipertahankan sampai saat ini. Gutta percha (penghasil getah percha) bahkan menjadi identitas flora PTPN VIII.

Atas desakan politik, sebagai ganti sistem perekonomian tanaman paksa pemerintah beralih kepada sistem perekonomian liberal dengan cara memberi keleluasaan kepada pihak swasta dan pemilik modal untuk berbisnis di Indonesia. Pabrik dan perusahaan pengolahan di dalam negeri Belanda sendiri membutuhkan kontinuitas pasokan

bahan baku sehingga ingin berinvestasi membuka perkebunan di Indonesia. Sebagai jaminan hukum bagi investor pada tahun 1870 ditetapkan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet* dan *Agrarische Besluit*). Undang-undang menjamin investasi perkebunan dengan pengaturan antara lain sebagai berikut:

- (1) Tanah milik rakyat tidak dapat dijualbelikan kepada non-pribumi.
- (2) Tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh non-pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan.
- (3) Untuk lahan domain pemerintah yang lebih luas, swasta non-pribumi boleh memiliki hak guna usaha yaitu:
 - (a) hak membangun yang disebut *recht van opsal* yang disingkat RVO
 - (b) hak sewa dan hak mewariskan untuk jangka waktu 75 tahun yang disebut hak *erfpacht*.

Pada masa perkebunan sistem liberal ini mulai berkembang 3 bentuk perkebunan yaitu: (1) perkebunan rakyat (milik pribumi), antara lain dari perluasan kebun tanam paksa, (2) perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda, misalnya perkebunan tanam paksa di lahan domain pemerintah, (3) perkebunan swasta non-pribumi, baik perorangan maupun perusahaan berdasarkan HGU. Pada dekade terakhir menjelang Perang Dunia I, perkebunan Indonesia mengalami kemajuan pesat dan produksi mengalami masa *booming*. Setelah PD I meletus dan dunia mengalami depresi ekonomi sejak tahun 1929 maka saat itu perkebunan Indonesia secara umum mengalami kemunduran. Akan tetapi perkebunan rakyat terus berkembang. Pada akhir abad ke-19 perkebunan rakyat hanya menyumbang sekitar 19% dari seluruh ekspor, pada tahun 1939 telah naik menjadi 37% dari total ekspor. Selama masa depresi antara 1929-1940 produksi perkebunan komoditas utama seperti gula, karet, dan teh merosot tajam.

Pada PD II selama masa pendudukan Jepang (1942-1945) perkebunan Indonesia semakin terlantar akibat situasi perang dan keamanan yang memburuk. Kecuali karet, semua komoditas perkebunan mengalami kemerosotan. Produksi lada turun 90%, produksi kapuk dan teh turun 30%, dan kopi turun 25%. Secara keseluruhan produksi perkebunan tinggal 20% dari produksi sebelum Perang Dunia II. Perkebunan karet tampaknya relatif tahan terhadap kondisi kurang terawat, dan penyiapan yang berkurang memberi kesempatan bagi pohon untuk tumbuh sehingga mampu bertahan walaupun dalam situasi perang.

2.3 Masyarakat Perkebunan Kolonial

Perkembangan perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kolonialisme dan kapitalisme. Kolonialisme melahirkan sistem kolonial (*colonial system*), situasi kolonial, dan hubungan kolonial yang diterapkan di perkebunan. Kapitalisme mendorong perkembangan perkebunan besar di Indonesia yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kolonial dalam mengeksploitasi sumberdaya lahan dan rakyat untuk sebesar-besarnya keuntungan pemilik kapital. Dalam sistem seperti inilah berkembang kultur masyarakat perkebunan bercorak kolonial yaitu didasarkan pada prinsip kolonial. Ciri pokok hubungan kolonial berpangkal pada prinsip dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi.

Perkebunan dibangun dengan membuka hutan yang letaknya jauh dari penduduk. Bahkan tenaga kerja (buruh) harus didatangkan dari luar daerah, umumnya dari Pulau Jawa membentuk komunitas yang berbeda baik bahasa maupun adat istiadat dari masyarakat sekitar. Komunitas perkebunan berbeda sama sekali dengan masyarakat sekitar secara sosial maupun ekonomi. Produk yang dihasilkan perkebunan mungkin juga berbeda dengan yang dihasilkan penduduk, yaitu menghasilkan produk yang berorientasi untuk pasar ekspor. Pihak manajemen beserta birokrat perkebunan memiliki gaji dan penghidupan yang sangat baik dan mengikuti kultur modern dunia. Pemukiman perkebunan berada jauh dari pusat kota dan peradaban asli. Keadaan ini menjadikan masyarakat perkebunan seperti terpisah dengan lingkungannya. Kehadiran usaha perkebunan modern di tengah masyarakat agraris tradisional menciptakan tipe perekonomian kantung (*enclave economic*) yang bersifat dualistis yaitu masyarakat modern yang seperti kota kecil dikelilingi masyarakat tradisional.

Masyarakat perkebunan kolonial adalah “kota kecil” yang multirasial dan multinasional. Penduduknya dihuni bangsa Eropa, Cina, dan pribumi dengan berbagai etnis terutama Jawa. Mereka adalah pendatang, bahkan umumnya

tanpa membawa keluarga (bujangan) yang tercabut dari akar budaya asalnya. Struktur masyarakatnya berbeda jelas antara golongan Eropa, Cina, dan pribumi. Antar golongan tersebut tidak terdapat ikatan solidaritas bahkan di dalam golongan tersebut ikatan solidaritasnya lemah. Komunitas perkebunan kolonial benar-benar merupakan daerah frontier (batas) yang terpisah dari komunitas sekitar. Komunitas tersebut terisolasi dan teralienasi sehingga mudah timbul krisis baik pada tingkat pribadi maupun kolektif. Pada tingkat tertentu krisis akan menimbulkan konflik dan kekerasan.

Struktur sosial masyarakat perkebunan dapat dibagi menjadi dua yaitu lapisan atas yang terdiri dari Bangsa Eropa dan lapisan bawah yang berisi masyarakat pribumi yang umumnya bekerja sebagai buruh. Pada lapisan puncak terdapat seorang *administrateur* yaitu pemimpin manajemen perkebunan yang dibantu oleh para asisten kebun dan pengawas (*opzichter*). Pada lapisan bawah, para buruh dikelompokkan dalam regu-regu yang masing-masing diawasi oleh seorang mandor. Para pengawas dan mandor adalah orang pribumi. Dalam hirarki kekuasaan perkebunan, para pengawas dan mandor merupakan perantara yang mewakili manajemen dan kelompok buruh. Pihak manajemen berkepentingan agar para pengawas dan mandor patuh dan berpihak pada atasan sehingga pengawasan dan instruksi pekerjaan berjalan efektif. Sebaliknya apabila pengawas dan mandor lebih condong membela para buruh maka pengawasan tidak efektif, lebih dari itu gerakan buruh tidak dapat dikontrol manajemen.

Pola hubungan kolonial bersifat diskriminatif dan rasial yang terjadi pada semua lini seperti struktur gaji, layanan sosial, dan pemukiman. Golongan Eropa menempati pemukiman mewah, sangat kontras dengan pemukiman pribumi terlebih kondisi barak-barak para buruh. Komunitas Eropa membentuk *enclave* di pemukiman perkebunan dimana posisi, pergaulan, hubungan, dan komunikasi sosialnya terjaga ketat. Sebagai lapisan atas, kelompok Eropa memandang rendah kaum pribumi yang jarang terjadi kontak sosial. Kontak hanya terbatas pada hubungan kerja industrial. Perkebunan menegakkan prinsip industrialis kolonial. Tuntutan produktivitas dan pencapaian target perusahaan dicapai dengan menegakkan kekuasaan otoriter dan otoriter agar para pekerja disiplin dan produktif. Situasi kontradiksi, alienasi, dan adanya konflik kepentingan acap kali berujung pada bentrok fisik.

Pada zaman kemerdekaan, manajemen perkebunan sistem kolonial semestinya sudah tidak ada lagi. Hubungan industrialis kolonial diganti dengan hubungan industrialis Pancasila. Tujuan perusahaan untuk meningkatkan produksi dan keuntungan tidak dilakukan melalui eksploitasi tenaga kerja dengan imbalan murah dan tanpa masa depan. Perkebunan era kemerdekaan mengemban amanat Undang-undang Perkebunan untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat berazaskan keterbukaan dan berkeadilan. Kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh satu golongan kecil tertentu di perkebunan. Kesejahteraan pegawai dan buruh perlu mendapat perhatian. Hubungan atasan-bawahan dengan prinsip kolonial tidak dijalankan lagi. Untuk menegakkan disiplin dan produktivitas ditegakkan dengan manajemen profesional antara lain melalui sistem kontrol dan insentif.

2.4 Perkembangan Perkebunan pada Masa Awal Kemerdekaan

Ketika masa revolusi (1945-1955), kondisi perkebunan tidak dapat dipulihkan. Perubahan pemerintahan dari kolonial menjadi pemerintah Indonesia berdampak pada pengalihan aset-aset dan kebijakan manajemen di sektor perkebunan. Perkebunan besar milik pemerintah Belanda diambil alih berdasarkan ketentuan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Perjanjian tersebut berisikan penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Indonesia Serikat termasuk pengambil alihan hutang Pemerintah Hindia Belanda oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai pengelola perkebunan dibentuk Pusat Perkebunan Negara (PPN) berdasarkan PP No 4 Tahun 1946 tentang pembentukan Pusat Perkebunan Negara. Perusahaan perkebunan yang terdiri dari nasionalisasi perkebunan besar milik pemerintah Hindia Belanda ini dikenal sebagai Pusat Perkebunan Negara Lama (PPN Lama).

Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, perkebunan besar milik swasta Belanda dan Eropa diambil alih sejak 10 Desember 1957 berdasarkan keputusan Penguasa Perang Pusat tanggal 9 Desember 1957 No. 1063/P.M.T./57 dan peraturan pelaksanaan Menteri Pertanian tertanggal 10 Desember 1957 No. 229/Um/57, perkebunan-perkebunan milik Belanda yang banyaknya 542 buah diambil alih dan dikuasai oleh Pemerintah. Penguasaan

ditugaskan kepada sebuah badan khusus Perusahaan Perkebunan Negara Baru atau disingkat P.P.N Baru. Pada tahun 1960 diadakan penggabungan antara Perusahaan Perkebunan dalam lingkup P.P.N lama dengan P.P.N baru menjadi suatu Lembaga Badan Pimpinan Umum urusan Perusahaan Perkebunan Negara disingkat BPU-PPN yang berkedudukan di Jakarta.

Adanya SK Menteri Pertanian No 229/UM/57 tanggal 10 Desember 1957 dianggap sebagai awal pembangunan perkebunan Indonesia di zaman kemerdekaan. Saat ini tanggal 10 Desember dikenal sebagai Hari Perkebunan. Berdasarkan SK tersebut dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN Baru) yang terdiri dari perkebunan besar milik swasta Belanda. Sebagai contoh dalam rangka nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan perkebunan eks milik swasta Belanda/Asing antara lain Inggris, Perancis dan Belgia di Jawa Barat dibentuk PPN-Baru cabang Jawa Barat. Di Cabang Jawa Barat, dalam periode 1960 – 1963 terjadi penggabungan perusahaan dalam lingkup PPN-Lama dan PPN-Baru menjadi PPN Kesatuan Jawa Barat I, PPN Kesatuan Jawa Barat II, PPN Kesatuan Jawa Barat III, PPN Kesatuan Jawa Barat IV dan PPN Kesatuan Jawa Barat V. Dalam perkembangan selanjutnya, selama periode 1963 – 1968 diadakan reorganisasi dengan tujuan agar pengelolaan perkebunan lebih tepat guna, dibentuk PPN Aneka Tanaman VII, PPN Aneka Tanaman VIII, PPN Aneka Tanaman IX dan PPN Aneka Tanaman X, yang mengelola tanaman teh dan kina, serta PPN Aneka Tanaman XI dan PPN Aneka Tanaman XII yang mengelola tanaman karet.

Secara deyure, seluruh nasionalisasi tersebut berdasarkan UU No 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah RI yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1959 tentang perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik belanda yang dikenakan nasionalisasi dan No 19 Tahun 1959 tentang perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sejak tanggal 3 Desember 1957.

2.5 Perkebunan Negara Masa Orde Baru dan Reformasi

Pada awal masa Orde Baru dengan dalih kekuasaan manajemen tidak boleh berada di BPU-BPU Pusat, dan manajemen harus di daerah-daerah produksi (desentralisasi), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No14 tahun 1968 tentang pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara), maka 4 BPU PPN yang semula 88 unit produksi/PPN tersebut dibubarkan, kemudian 88 unit PPN direorganisasi, menjadi 28 Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), masing-masing berdiri sendiri, menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) I sampai dengan PNP XXVIII.

Setahun PNP berdiri, sudah disahkan Undang-undang No 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara yang mengamanatkan bahwa bentuk perusahaan negara hanya ada tiga yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Dengan demikian tersirat bahwa PNP akan berubah menjadi PERSERO. Sebagai penjabaran undang-undang tersebut, disahkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1969 tentang perusahaan perseroan yang menyatakan bahwa negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas. Menteri Keuangan ditunjuk untuk mewakili negara selaku pemegang saham dari setiap penyertaan modal negara, namun Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili negara kepada menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut.

Pengalihan bentuk PNP menjadi PERSERO dilakukan secara bertahap dan melalui proses kelayakan. Pada tahun 1971 ada 12 PNP yang setelah melalui penelitian dan penilaian, telah memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan yaitu antara lain PNP III – PNP VII. Apabila pemerintah menilai kurang layak untuk berdiri sendiri atau untuk lebih meningkatkan efisiensi maka dilakukan penggabungan PNP, misalnya dibentuk PTP XV-XVI, PTP XXI-XXII, dan PTP XXIV-XXV. PNP yang paling terakhir beralih menjadi PTP adalah PNP XIX yang berubah menjadi PTP XIX berdasarkan PP No 13 Tahun 1990. Sementara itu PTP XXXI merupakan PTP baru yang berasal dari PG Cinta Manis di Sumatera Selatan dan PG Bunga Mayang yang dibangun dan dikelola oleh PTP XXI-XXII Jawa Timur, berdiri sendiri berdasarkan PP No 15 Tahun 1989. Perseroan Terbatas Perkebunan merupakan BUMN dan berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN.

Pengawasan terhadap kinerja PTP terus dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan efisiensi manajemen, maka sejak tahun 1996 terjadi lagi perombakan besar struktur PTP seluruh Indonesia dan berganti nama menjadi PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dari 31 PTP digabung dan disertai penyertaan modal berasal dari proyek perkebunan baru yang dikelola oleh PTP tertentu sehingga menjadi struktur manajemen yang lebih ramping yaitu hanya 14 PTPN. PTPN I sampai PTPN VII berada di Sumatera, PTPN VIII sampai PTPN XII berada di Jawa, sedangkan Kalimantan baru ada satu PTPN, dan di Sulawesi Selatan baru ada satu PTPN.

Tabel 2. *Asal dan dasar hukum pembentukan PTP*

Nama PTP	Asal	Dasar hukum
PTP I	PNP I	PP No 7 Tahun 1981
PTP II	PNP II	PP No 28 Tahun 1975
PTP III	PNP III	PP No 9 Tahun 1971
PTP IV	PNP IV	PP No 26 Tahun 1971
PTP V	PNP V	PP No 27 Tahun 1971
PTP VI	PNP VI	PP No 28 Tahun 1971
PTP VII	PNP VII	PP No 29 Tahun 1971
PTP VIII	PNP VIII	PP No 5 Tahun 1972
PTP IX	PNP IX	PP No 44 Tahun 1973
PTP X	PNP X	PP No 1 Tahun 1979
PTP XI	PNP XI	PP No 34 Tahun 1971
PTP XII	PNP XII	PP No 25 Tahun 1971
PTP XIII	PNP XIII	PP No 24 Tahun 1971
PTP XIV	PNP XIV	PP No 45 Tahun 1973
PTP XV	PNP XV	PP No 32 Tahun 1973
PTP XV-XVI	PTP V dan PNP XVI	PP No 11 Tahun 1981
PTP XVII	PNP XVII	PP No 23 Tahun 1974
PTP XVIII	PNP XVIII	PP No 23 Tahun 1972
PTP XIX	PNP XIX	PP No 13 Tahun 1990
PTP XX	PNP XX	PP No 6 Tahun 1971
PTP XXI-XXII	PNP XXI dan PNP XXII	PP No 23 Tahun 1973
PTP XXIII	PNP XXIII	PP No 8 Tahun 1971
PTP XXIV	PNP XXIV	PP No 44 Tahun 1974
PTP XXIV-XXV	PTP XXIV dan PNP XXV	PP No 15 Tahun 1975
PTP XXVI	PNP XXVI	PP No 64 Tahun 1971
PTP XXVII	PNP XXVII	PP No 7 Tahun 1972

Nama PTP	Asal	Dasar hukum
PTP XXVIII	PNP XXVIII	PP No 41 Tahun 1985
PTP XXIX	PNP XXIX	PP No 74 Tahun 1971
PTP XXX	PNP XXX	PP No 25 Tahun 1973
PTP XXXI	Penyertaan modal PTP XXI-XXII	PP No 15 Tahun 1989

Tabel 3. Asal peleburan dan dasar hukum pembentukan PTPN

No	PTP Nusantara	Lokasi	Asal Peleburan	Dasar Hukum
1.	PTPN I	Aceh	PTP I, dan penyertaan modal proyek PTP II, III, VII, IX	PP No 6 Tahun 1996
2.	PTPN II	Sumatera Utara	PTP II dan PTP IX	PP No 7 Tahun 1996
3.	PTPN III	Sumatera Utara	PTP III, IV, V	PP No 8 Tahun 1996
4.	PTPN IV	Sumatera Utara	PTP VI, VII, VIII	PP No 9 Tahun 1996
5.	PTPN V	Riau	Penyertaan modal proyek PTP II, IV, V	PP No 10 Tahun 1996
6.	PTPN VI	Sumatera Barat-Jambi	Penyertaan modal proyek PTP III, IV, VI, VIII	PP No 11 Tahun 1996
7.	PTPN VII	Sumatera Selatan-Lampung	PTP X dan PTP XXXI	PP No 12 Tahun 1996
8.	PTPN VIII	Jawa Barat	PTP XI, XII, XIII	PP No 13 Tahun 1996
9.	PTPN IX	Jawa Tengah	PTP XV-XVI, PTP XVIII	PP No 14 Tahun 1996
10.	PTPN X	Jawa Timur	PTP XIX, PTP XXI-XXII, dan PTP XXVII	PP No 15 Tahun 1996
11.	PTPN XI	Jawa Timur	PTP XX dan PTP XXIV-XXV	PP No 16 Tahun 1996
12.	PTPN XII	Jawa Timur	PTP XXIII, XXVI, XXIX	PP No 17 Tahun 1996
13.	PTPN XIII	Kalimantan	Penyertaan modal proyek PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, PTP XXIV-XXV, XXVI, XXIX	PP No 18 Tahun 1996
14.	PTPN XIV	Sulawesi Selatan	PTP XXVIII, XXXII, PT Bina Mulya Ternak	PP No 19 Tahun 1996

Selain PT Perkebunan Nusantara, terdapat BUMN perkebunan yang lain yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). BUMN ini berasal dari perusahaan perdagangan hasil bumi Oei Tiong Ham Concern di Semarang. Pada tahun 1961 diambilalih oleh pemerintah. Tahun 1964, perusahaan itu berubah nama menjadi PT Pusat Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). RNI bergerak di tiga bidang usaha, yaitu agroindustri, farmasi dan alat kesehatan, serta perdagangan dan distribusi. Dalam bidang agro-industri, RNI memiliki 10 pabrik gula di Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa Timur, perkebunan sawit dan perkebunan teh serta beberapa pabrik pengolahan produk hulu dan samping berbasis tebu.

2.6 Perkebunan Negara pada Masa Depan

Kinerja BUMN perkebunan dirasakan masih perlu terus diperbaiki. Sejak tahun 2006, pemerintah berencana membentuk holding BUMN Perkebunan. Jika holding BUMN Perkebunan terbentuk dan seluruh BUMN perkebunan, mulai dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I hingga PTPN XIV, serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bersatu, maka secara lahan, BUMN perkebunan RI akan menjadi BUMN perkebunan terbesar di dunia, mengalahkan perusahaan perkebunan raksasa dunia milik Malaysia, Sime Darby. Hingga semester pertama 2011, total lahan 15 BUMN perkebunan mencapai 1,47 juta hektare dengan total aset mencapai Rp 48,2 triliun. Areal tersebut merupakan lahan kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, dan tebu. BUMN Perkebunan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,714 triliun pada semester pertama 2011 atau setara Rp 1,2 Juta per hektar. Jika dibandingkan dengan swasta, Laba 15 BUMN perkebunan ini masih jauh tertinggal.

Yang melatarbelakangi program holding BUMN Perkebunan adalah adanya persaingan baik nasional maupun global dalam komoditi perkebunan berimplikasi pada perlunya peningkatan daya saing BUMN Perkebunan. Kondisi lingkungan usaha BUMN Perkebunan saat ini belum mendukung untuk menghadapi persaingan tersebut yaitu: (1) BUMN Perkebunan terikat dengan aturan-aturan birokrasi korporasi dan birokrasi pemerintah lokal serta belum independen terhadap kelompok interes, (2) struktur organisasi BUMN Perkebunan saat ini belum efektif untuk meningkatkan profitabilitas dan akselerasi pertumbuhan usaha, (3) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kinerja belum optimal, (4) komposisi tanaman dan produktivitas masih perlu diperbaiki, (5) profitabilitas masih rendah, (6) adanya hambatan pendanaan operasional dan investasi, (7) jaringan dan pengendalian pasar masih terbatas, (8) pemanfaatan silang sumberdaya antar BUMN perkebunan sulit dilakukan. Adanya total luas lahan yang dikelola sangat luas, sumberdaya manusia serta pengalaman kerja yang sangat baik, pasar potensial yang terus berkembang, serta besarnya potensi pengembangan industri hilir, maka diperlukan optimalisasi pemberdayaan atau sinergi antara BUMN perkebunan di bidang produksi, operasional, pemasaran, keuangan, penelitian, sumberdaya, dan organisasi dengan membentuk holding BUMN Perkebunan. Dengan 14 PTPN saat ini, rentang kendali oleh Kementerian BUMN masih luas. Terbentuknya perusahaan holding Perkebunan BUMN akan menyederhanakan pengawasan dan pengendalian oleh Kementerian BUMN.

2.7 Sejarah Lembaga Penelitian Perkebunan

Sejak zaman kolonial, berdirinya lembaga penelitian bidang perkebunan umumnya dimotori oleh perusahaan perkebunan besar swasta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perusahaan. Namun ada juga lembaga penelitian perkebunan yang diinisiasi bersama antara perusahaan besar dan pemerintah. Perubahan struktur, pembina atau pengawas lembaga penelitian ini terjadi berkaitan dengan sumber dan efisiensi pendanaan. Perubahan pemerintahan, perubahan struktur perusahaan, serta perubahan kebijakan akan menyebabkan perubahan struktur kelembagaan lembaga penelitian.

Komoditas perkebunan yang diusahakan oleh perkebunan besar mempunyai lembaga penelitian sendiri yang bertugas meneliti pengembangan usaha komoditas tersebut seperti penelitian komoditas karet, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, kina, dan tebu. Diawali dengan tebu, mengingat pentingnya nilai ekonomi gula di masa Hindia Belanda, maka pabrik-pabrik gula di Jawa secara berurutan pada tahun 1885 mendirikan Het Proefstation Midden Java di Semarang, diikuti berdirinya Proefstation voor Suikerriet in West Java di Kagok pada tahun 1886, dan Proefstation Oost Java di Pasuruan pada tahun 1887 yang dikenal dengan sebutan POJ. Tahun 1893 Proefstation di Semarang ditutup, dan pada tahun 1905 Proefstation di Semarang dan POJ Pasuruan secara organisatoris bergabung dan pada tahun 1925 secara fisik menjadi satu di Pasuruan. Lembaga POJ ini yang bertahan hingga sekarang dan menghasilkan varietas tebu POJ yang terkenal. Pada periode 1942-1945 POJ dikuasai oleh Pemerintah Jepang dan tahun 1945 Komite Nasional Indonesia mengambil alih POJ dari Pemerintah Jepang.

Setelah terjadi nasionalisasi perkebunan gula milik bangsa Belanda, institusi ini sejak 10 Desember 1957 dikelola oleh Badan Koordinasi Perkumpulan dan Organisasi Perkebunan dan diberi nama Balai Penyelidikan Perusahaan

Perkebunan Gula (BP3G) berdasarkan SK Mentan No. 229/Um/57 tanggal 10 Desember 1957 yang diperbaharui dengan SK Mentan No. 49/Um/57 tanggal 17 April 1958. Tanggal 11 Mei 1987 rapat Dewan Pembina mengubah nama BP3G menjadi P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia).

Pada tahun 1901 pengusaha perkebunan kakao di Jawa Tengah mendirikan Proefstation voor Cocoa di Salatiga yang diperluas cakupannya menjadi Algemeen Proefstation voor de Bergcultures, serta pengusaha perkebunan Sukabumi mendirikan Proefstation voor Thee melalui Gouvernment Besluit No 16 tanggal 13 April 1902. Karena alasan jarak antara lokasi kebun dengan lembaga penelitiannya, maka Algemeen Proefstation voor de Bergcultures dan Proefstation voor Thee dibubarkan, tetapi dibentuk empat institusi penelitian yang menggantikannya, yaitu Proefstation voor Rubber di Bogor, Algemeen Proefstation voor Thee di Bogor, dan Malang Proefstation di Malang dan Besoekisch Proefstation di Jember. Pada tanggal 31 Mei 1911, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Proefstation voor Kina di Pengalengan, melalui Gouvernment Besluit No. 35.

Pada tahun 1933 dilakukan penciutan dari enam menjadi tiga lembaga penelitian yaitu Profestation West Java, Profestation Midden-en Oost Java dan Besoekisch Profestation. Ketiganya semula dikelola oleh Algemeen Landbouw Syndicat (ALS) namun kemudian diserahkan kepada Centrale Vereniging tot Beheer van Profestation voor de Overjarige Cultuur in Indonesie yang lebih dikenal dengan sebutan Centrale Profestation Vereniging (CPV).

Dalam perjalanannya, Profestation West Java diubah menjadi Profestation der CPV Bogor, Profestation Midden-en Oost Java menjadi Profestaion der CPV Malang, dan Besoekisch Profestation menjadi Profestation der CPV Jember yang sekarang bernama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI). Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, pada tahun 1957 Profestation der CPV diubah namanya menjadi Balai Penyelidikan Perkebunan Besar berkedudukan di Bogor dengan cabangnya di Jember. Bersamaan dengan itu Indonesisch Instituut voor Rubber Onderzoek/INIRO yang berdekatan dengan gedung CPV diubah namanya menjadi Balai Penyelidikan dan Pemakaian Karet.

Pada tahun 1968 kedua lembaga penelitian tersebut digabung dan namanya diganti menjadi Balai Penelitian Perkebunan Bogor. Pada tahun 1989 nama Balai Penelitian Perkebunan Bogor diubah menjadi Pusat Penelitian Perkebunan Bogor. Pada akhir 1992 Pusat Penelitian Perkebunan Bogor diubah menjadi Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan.

Di Sumatera, pada tahun 1916 didirikan pula Algemeen Proefstation der AVROS (APA) oleh perusahaan perkebunan yang tergabung dalam Algemeen Vereniging Rubber Planters Ooskust van Sumatera (AVROS). Pada tahun 1941, AVROS bersama Bond van Eigenaren van Netherland-Indische Rubber Ondernemingen membentuk pula badan otonomi yang bertugas mengembangkan penelitian dan pemakaian karet alam, yang dinamakan Netherlands Indische Instituut voor Rubber Onderzoek Stichting (NIRO Stichting) yang membawahi satu balai, yaitu INIRO (Indonesisch Instituut voor Rubber Onderzoek). Dalam perkembangan strategisnya, AVROS tidak saja menghimpun pengusaha karet tetapi juga pengusaha kelapa sawit. sehingga AVROS kemudian mengembangkan pusat penelitian untuk komoditi perkebunan, misalnya di Sei Putih untuk karet dan di Marihat untuk kelapa sawit. Setelah nasionalisasi pada tahun 1957, APA dikelola oleh Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumatera (GAPPERSU) dan APA diubah namanya menjadi RISPA (Research Institute of Sumatera Planters Association). Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 247/UM/57 tanggal 11 Desember 1957 ditetapkan bahwa RISPA ditempatkan di bawah Kementerian Pertanian RI yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Perkumpulan dan Organisasi Perkebunan. Pada tahun 1968 RISPA berubah menjadi Balai Penelitian Perkebunan Medan (BPPM) dengan pembinaan dan pembiayaannya diserahkan kepada Direksi PN Perkebunan I s/d IX sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian RI No. 353/Kpts/OP/12/1968 tanggal 20 Desember 1968.

Sejarah Pusat Penelitian Marihat (PPM) terkait erat dengan perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya seperti Bandar Oliepalmen Cultuur Maatsschappij (BOCM), Rubber Cultuur Maatsschappij (NHM), Vereniging Deli Maatsschappij (VDM) yang didirikan berdasarkan IBW 1927 yang juga memiliki satu bagian yang bergerak dalam riset di Marihat. Pada tahun 1957 perusahaan-perusahaan tersebut dinasionalisasi dan tahun 1960, terbentuklah PPN Aneka Tanaman. PPN Aneka Tanaman ini meneruskan riset di Marihat dengan mengubahnya menjadi Pusat Penelitian

Aneka Tanaman Sumatera (Pupenas) dengan ruang lingkup kelapa sawit, teh, kina, kopi, pinus dan kapuk. Pupenas mengembangkan kebun percobaan kelapa sawit yang ditinggalkan Belanda di berbagai tempat seperti Tinjowan, Dolok Sinumbah, Gunung Bayu, Pulau Raja, Pabatu, dan Sawit Sebrang. Tahun 1968, Pupenas berubah nama menjadi Marihat Research Station (MRS) di bawah pembinaan PTP I, II, VI, VII dan VIII dengan komoditi kelapa sawit, teh dan kakao.

Berbeda dengan lembaga penelitian kelapa sawit yang berawal dan berkembang di Sumatera Utara, lembaga penelitian karet berkembang di Sumatera dan Jawa. AVROS mengawali pengembangan Pusat Penelitian Sei Putih. Setelah nasionalisasi perkebunan, pada bulan September 1963, Badan Pimpinan Umum (BPU) PPN Karet membentuk Rubber Research Centre (RRC) di Tanjung Morawa untuk wilayah Sumatera dan RRC di Cinyuruan untuk wilayah Jawa. Research Center Cinyuruan meneruskan penelitian teh dan kina, dan Research Center Getas melakukan penelitian karet.

2.8 Asosiasi Penelitian Perkebunan

Sistem pembiayaan penelitian seperti yang tersebut terakhir di atas menimbulkan beberapa hambatan akibat : (i) kesulitan pemerintah mendanai balai-balai penelitian eks-Belanda yang statusnya bukan pegawai negeri, (ii) beban PNP-PNP dalam pembiayaan ganda balai penelitian dan research center yang melakukan kegiatan komoditi yang sama, dan (iii) rendahnya efisiensi biaya dan pengelolaan. Untuk mengatasi kendala ini maka pada tahun 1987 dibentuk Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia (AP3I) yang beranggotakan BUMN Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan Swasta serta menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah.

Melalui SK Menteri Pertanian No. 823/Kpts/KB/8110/II/89, pengelolaan dan pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk komoditi perkebunan diserahkan kepada AP3I. Institusi penelitian yang diserahkan kepada AP3I meliputi 10 balai penelitian, yaitu Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) Bogor menangani penelitian rintisan, Puslitbun Sungei Putih untuk Penelitian Karet, Puslitbun Tanjung Morawa untuk penelitian karet, Puslitbun Getas untuk penelitian karet, Puslitbun Medan untuk penelitian Kelapa Sawit, Puslitbun Marihat untuk penelitian kelapa sawit, Puslitbun Bandar Kuala untuk penelitian kelapa, Puslitbun Gambung unuk penelitian teh dan kina, serta Puslitbun Jember untuk penelitian kopi dan kakao. Untuk menguasai aspek ekonomi dan pemasaran, maka AP3I membentuk Pusat Penelitian dan Pengkajian Agribisnis (P2PA) melalui TAP RA AP3I Nomor 12/ra/1989 dan Memorandum Menteri Muda Pertanian No. 05.210/145/MM/IX/89.

Agar dapat melakukan koordinasi dengan lebih baik, pada tahun 1992 dilakukan reorganisasi institusi penelitian dengan cara mengelompokkannya berdasarkan komoditas yang ditanganinya. Sesuai dengan surat keputusan Ketua Dewan Pimpinan Harian AP3I No. 084/Kpts/DPH/XII/92 tanggal 24 Desember 1992 tentang penataan pengelolaan unit pelaksana penelitian di lingkungan AP3I, maka pada 4 Februari 1993 dibentuk Pusat Penelitian Kelapa Sawit berkedudukan di Medan, yang merupakan gabungan dari Puslitbun Medan, Puslitbun Marihat, dan Puslitbun Bandar Kuala.

Puslitbun Bandar Kuala adalah lembaga penelitian yang relatif baru dan tidak berkaitan dengan kelapa sawit dan masa kolonial. Puslitbun Bandar Kuala dibentuk pada tahun 1982 dengan nama Pusat Penelitian Kelapa (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi PTP II, VI dan VII untuk mengimplementasi SK Mentan yang memberikan tugas pengembangan kelapa kepada BUMN perkebunan. Penggabungan ketiga Puslitbun tersebut (Puslitbun Medan, Puslitbun Marihat, dan Puslitbun Bandar Kuala) dilakukan dalam upaya peningkatan efisiensi pengelolaan organisasi.

Dalam program reorganisasi, Puslitbun Jember diubah menjadi Pusat Penelitian (Puslit) Kopi dan Kakao, Puslitbun Gambung diubah menjadi Puslit Teh dan Kina, Puslitbun Medan digabung dengan Puslitbun Marihat dan Puslitbun Bandar Kuala menjadi Puslit Kelapa Sawit (PPKS), sedangkan Puslitbun Getas, Puslitbun Sembawa, Puslitbun Sungei Putih, dan Bagian Teknologi karet Bogor Puslitbun Bogor digabungkan menjadi Puslit Karet (PPK). Untuk puslit yang merupakan gabungan beberapa puslitbun, puslitbun ditetapkan sebagai balai penelitian yang secara

organisasi berasal di bawah puslit. Sementara itu Puslitbun Bogor diubah menjadi Puslit Bioteknologi Perkebunan melalui SK DPH AP3I No. 084/Kpts/DPH/XII/1992 pada akhir tahun 1992.

Asosiasi Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (AP2GI) beranggotakan BUMN dan perusahaan gula milik swasta yang memiliki satu balai penelitian, yaitu Balai Penelitian Perusahaan Perkebunan Gula (BP3G) di Pasuruan, yang pada tahun 1987 diberi nama Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI). AP2GI baru bergabung dengan AP3I pada tanggal 1 Februari 1996 dan dilebur menjadi satu asosiasi dengan nama Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia (APPI).

Dengan penggabungan ini, APPI mengelola lima pusat penelitian, yaitu : Puslit Kelapa Sawit, Puslit Karet, Puslit Teh dan Kina, Puslit Kopi dan Kakao, serta P3GI. Puslit bioteknologi Perkebunan diserahkan di bawah koordinasi Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan (Balit Bio), sedangkan P2PA diserahkan di bawah koordinasi Puslit Sosial Ekonomi (PSE). Balit Bio dan PSE ini adalah instansi resmi milik Badan Litbang Pertanian. Meskipun di bawah koordinasi Badan Litbang Pertanian, sampai saat ini pembiayaan operasional ex-Puslit Bioteknologi dan ex-P2PA masih ditanggung oleh APPI karena status kepegawaiannya tidak dapat dijadikan pegawai negeri sipil.

Dalam perjalanan selanjutnya, APPI membentuk Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) untuk melaksanakan tugas koordinasi lintas puslit yang berada pada naungan APPI, yaitu PPKS, Puslit Karet, Puslit Kopi dan Kakao, Puslit Gula, Puslit Teh dan Kina, dan Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan. Ketetapan Rapat Anggota Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia (APPI) Nomor: 03/ RA-APPI/LB/2010 pada tanggal 5 Februari 2010 mensahkan pembentukan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) yang merupakan transformasi dari LRPI. Transformasi ini ke depan akan diteruskan dengan menjadikan semua puslit sebagai anak perusahaan yang berwujud perseroan terbatas.

Menteri Pertanian RI melalui surat No 199/TU.210/M/9/2009 mendukung perubahan status LRPI menjadi PT RPN dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai mandat yang diamanatkan LRPI yaitu melaksanakan riset dan pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, kina dan tebu. Menteri Negara BUMN dengan surat No. S-713/MBU/2009 tanggal 30 September 2009, menyetujui pendirian PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN). Selanjutnya PT RPN didirikan berdasarkan akta No. 01 tanggal 20 Nopember 2009 dari notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., di Jakarta.

2.9 Lembaga Penelitian Perkebunan Lingkup Litbang Pertanian

Selain itu, terdapat lembaga penelitian perkebunan yang dibiayai dari anggaran negara, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbang Perkebunan) yang berada di lingkup Badan Litbang Pertanian. Puslitbang Perkebunan merupakan transformasi dari Lembaga Penelitian Tanaman Industri (LPTI). Sedangkan LPTI bermula dari Cultuurtuin didirikan pada tahun 1876 merupakan bagian dari Kebun Raya Bogor sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sejarah Puslitbang Perkebunan

Periode	Nama Instansi	Organisasi Induk
1876 – 1918	Cultuurtuin	Kebun Raya Bogor
1918 – 1945	Cultuurtuin	Algemeen Proefstation voor de Landbouw
1945 – 1961	Bagian Tanaman Dagang	Balai Besar Penyelidikan Pertanian
1962 – 1967	- Lembaga Penelitian Tanaman Serat dan Jenis-jenis Tanaman Industri Lain	Departemen Pertanian

Periode	Nama Instansi	Organisasi Induk
	- Lembaga Penelitian Kelapa dan Jenis-jenis Tanaman Lemak Lainnya	
1967 – 1975	Lembaga Penelitian Tanaman Industri	Direktorat Jenderal Perkebunan
1975 – 1980	Lembaga Penelitian Tanaman Industri	Badan Litbang Pertanian
1980 – 1998	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri	Badan Litbang Pertanian
1998 – 2000	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Badan Litbang Pertanian
2000 – sekarang	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	Badan Litbang Pertanian

Sumber: Puslitbang Perkebunan (2012)

Badan Litbang Pertanian dibentuk berdasarkan Keppres No. 44 dan 45 tahun 1974 yang antara lain membawahi Puslitbang Perkebunan. Lembaga-lembaga di bawah Badan Litbang Pertanian dapat secara dinamis berubah terkait dengan pembentukan kabinet dan kebijakan pemerintah. Dengan pemisahan Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan, maka berdasarkan Keppres No. 24 tahun 1983 dibentuk Puslitbang Tanaman Industri sebagai transformasi Puslitbang Perkebunan dan Kehutanan. Berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1998 Badan Litbang Pertanian mengalami perubahan karena Puslitbang Tanaman Industri masuk ke Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Dengan Kepmentan No. 01/ Kpts/OT.210/1/2001 susunan organisasi Badan Litbang Pertanian mengalami perubahan kembali yaitu perubahan nomenklatur Puslit menjadi Puslitbang dan kembalinya Puslitbang Perkebunan ke lingkungan Departemen Pertanian.

Balai penelitian di lingkup Balitbang Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (Balitro), di Bogor, merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011, mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman rempah, obat, aromatik dan jambu mete.
2. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), di Malang, merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011, mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.
3. Balai Penelitian Tanaman Palma (Balitka), di Manado, merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lainnya (Balitka), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/OT/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011, mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman palma.
4. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) di Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat, merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri (Balittri). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011, BALITTRI mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman industri dan penyegar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghani, M.A. 2003. *Sumber Daya Manusia Perkebunan dalam Perspektif*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kano, H., F. Husken, D. Suryo. 1996. *Di Bawah Asap Pabrik Gula Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kartodirdjo, S. dan D. Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Mubyarto dan Daryanti. 1991. *Gula Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Mubyarto. 1993. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Puslitbang Perkebunan. 2012. Sejarah. www.perkebunan.litbang.deptan.go.id.
- Simarmata, R. 2002. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Insist. Yogyakarta.